



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Pringsewu



D O K U M E N

**PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN/ KOTA
(SSK)**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang berisi tentang pemetaan sanitasi skala kabupaten/kota, kerangka pengembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi, serta kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota hingga (5 tahun) kedepan. Pemutakhiran SSK merupakan pemantapan dari perencanaan SSK yang telah disusun sebelumnya, dengan maksud untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi dan mengakomodasikan pencapaian target Universal Access.

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota. Dokumen SSK ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi.

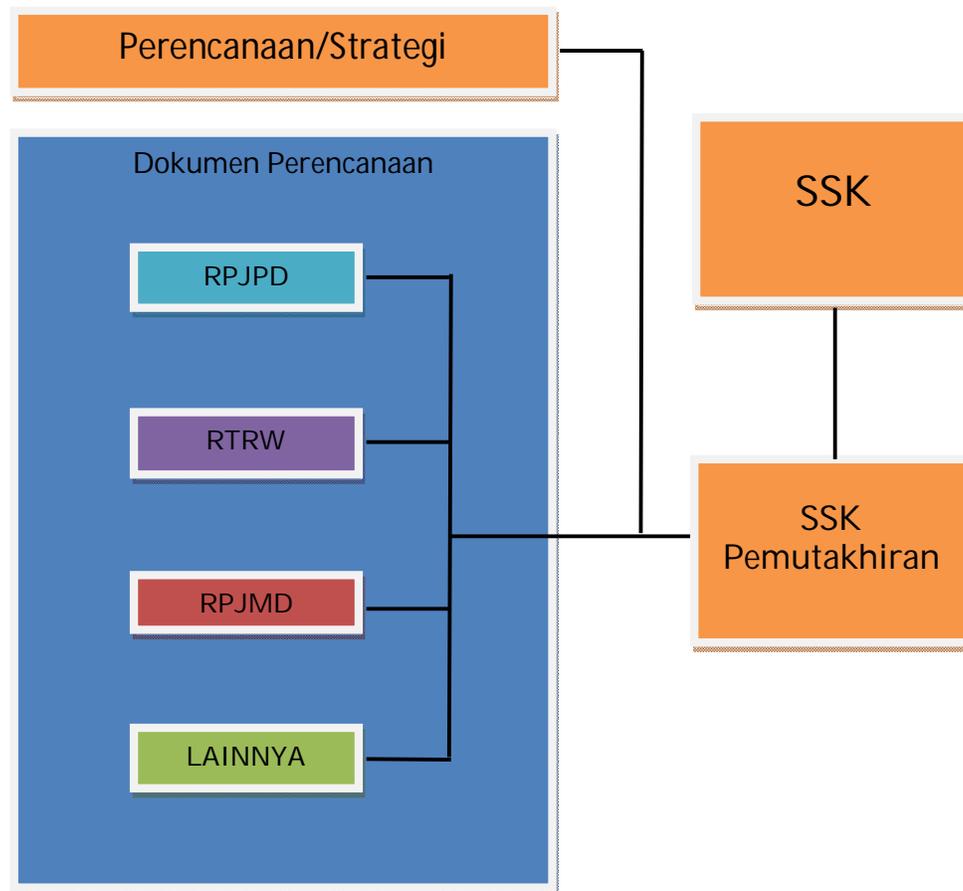
Pemutakhiran SSK di Kabupaten Pringsewu perlu dilakukan, karena :

1. Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK sebelumnya telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun.
2. Untuk peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang masih menyisakan data dan informasi yang belum disajikan atau belum lengkap sehingga ada keraguan atas validitas data yang digunakan.
3. Sejalan dengan target pemerintah yaitu untuk mempercepat implementasi pencapaian target Universal Access di tahun 2019.

Sementara kaitan dokumen pemutakhiran SSK dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan SSK sebelumnya dan SSK Pemutakhiran dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain



Peran SSK dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Pringsewu adalah:

- Memberikan arahan serta koridor dalam penyusunan strategi sanitasi didalam penetapan sistem dan pelayanan sanitasi Kabupaten Pringsewu.
- Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Pringsewu selama 5 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
- Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi

1.2 Metodologi

Metode yang dipergunakan dalam Pemutakhiran SSK ini adalah sebagai berikut :

A. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara desk study (data primer, data sekunder, internet, dll), field research (observasi, wawancara dll), FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam (indepth interview). Dalam pengumpulan data dilakukan beberapa langkah, yaitu:

1. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi. Tidak hanya sekedar kompilasi, tetapi juga dilakukan proses seleksi dan verifikasi data.

2. Pendalaman Data Sekunder yang telah diperoleh

Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan:

- Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu selaku Ketua Pokja Sanitasi.
- Kunjungan lapangan (observasi atau supervisi)
- Diskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi.

3. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan teknik survey lapangan, meliputi: wawancara, depth interview (wawancara mendalam), pengamatan langsung di lapangan (observasi), diskusi terfokus, dimana fokus sasarannya adalah masyarakat secara umum, tokoh, organisasi, pihak swasta atau, LSM, pemerintah, media dan lain-lain.

Untuk mendapat data primer, akan dilaksanakan study EHRA (Environmental Health Risk Assessment) juga study dan kajian spesifik lainnya yaitu : kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi (Sanitation Supply Assessment – SSA), studi komunikasi dan media, studi Peranserta Masyarakat , Studi Kelembagaan dan Kebijakan, studi Keuangan dan Perekonomian Daerah serta studi Sanitasi Sekolah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Pemutakhiran SSK, adalah:

1. Data Sekunder, meliputi:

- Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program sanitasi di masing-masing dinas/ instansi terkait,
- Dokumen penting tingkat kota dan dokumen strategi perencanaan lainnya, seperti: BPS,SSK,MPS,RPJMD,RPIJM,Renstra SKPD, Laporan Pertanggungjawaban, dan lain-lain;
- Narasumber untuk klarifikasi data-data, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/instansi terkait, meliputi pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.

2. Data Primer, merupakan data yang didapat dari hasil lapangan, seperti: hasil survey studi Peranserta Masyarakat, Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA), Studi Komunikasi dan Media, dan Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA).

3. Data Persepsi SKPD, yang didapat dari hasil wawancara atau diskusi dengan SKPD terutama yang terkait pada sektor sanitasi.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan untuk menganalisa atau mengkaji beberapa data dan informasi yang didapatkan baik berdasarkan desk study atau kajian lapangan dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

D. Proses Pemutakhiran SSK

Proses Pemutakhiran SSK dari mulai penulisan/dokumentasi sampai dengan penyepakatan dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

a. Proses 1 : Internalisasi dan penyamaan Persepsi

- Adanya kesepahaman dan kesamaan persepsi mengenai pentingnya pembangunan sanitasi serta perlunya pemutakhiran SSK.
- Menyepakati proses penyusunan, jadwal kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Pokja.

b. Proses 2 : Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi

- Memahami wilayah kajian
- Menyusun dan menyepakati profil wilayah dan profil sanitasi Kabupaten/Kota
- Memetakan kondisi sanitasi Kabupaten/Kota terkini dan permasalahan yang dihadapi
- Menyepakati area besiko sanitasi

c. Proses 3 : Skenario Pembangunan Sanitasi

- Menyusun indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu lima tahun
- Kesepakatan Visi dan Misi Sanitasi.
- Adanya zona dan sistem sanitasi serta cakupan layanannya.
- Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi.
- Adanya strategi pengembangan sanitasi.
- Adanya daftar Indikasi Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi.
- Adanya matriks monitoring dan evaluasi capaian SSK.

d. Proses 4 : Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi

- Mendapatkan kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi kepada stakeholder terkait di tingkat Kab./Kota, Provinsi dan Pusat.
- Membangun kesepahaman dan dukungan terhadap program, kegiatan dan pendanaan pembangunan sanitasi dari berbagi pemangku kepentingan baik pemerintah maupun nonpemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, kemudian mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan sanitasi di daerah.
- Adanya program, kegiatan dan besaran pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
- Terbangunnya komitmen program, kegiatan dan indikasi sumber pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- Adanya pembahasan program, kegiatan dan indikasi sumber serta besaran pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Provinsi dan Pusat.
- Adanya program/kegiatan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap).
- Adanya sumber pendanaan indikatif dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber lainnya.
- Adanya program, kegiatan dan indikasi besaran pendanaan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap).

e. Proses 5 : Finalisasi

- Tersusunnya Dokumen SSK Kabupaten/Kota
- Terangarkannya program dan kegiatan di dalam dokumen penganggaran Kabupaten/Kota.
- Pengesahan SSK Kabupaten oleh Kepala Daerah yaitu Bupati

1.3 Dasar Hukum

a. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
12. Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

b. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Tentang RPJMN
2. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

c. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

d. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Baku Mutu Air Limbah.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

e. Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205 Tahun 2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

f. Kebijakan Daerah

1. Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 - 2031
2. Perda Kabupaten Pringsewu Nomer 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
3. Perda Kabupaten Pringsewu No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/110/KPTS/D.02/2012 tentang Forum Kabupaten Pringsewu Sehat tanggal 30 April 2012

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Pemutakhiran SSK Kabupaten Pringsewu, ini terdiri dari 6 bab yang meliputi :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Methodologi Penyusunan, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

2. BAB 2 Profil Sanitasi Saat Ini

Berisi mengenai Gambaran Wilayah, Kemajuan Pelaksanaan SSK, Profil Sanitasi Saat ini, Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi.

3. BAB 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi

Berisi mengenai Visi dan Misi Sanitasi, Tahapan pengembangan sanitasi, Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, Skenario pencapaian sasaran, kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

4. BAB 4 Strategi Pengembangan Sanitasi

Berisi mengenai Strategi Pengembangan Sanitasi sub sektor Air Limbah Domestik, Pengelolaan Persampahan dan Drainase Perkotaan.

5. BAB 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi



Berisi mengenai Ringkasan, Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber pendanaan Pemerintah, Non Pemerintah, Antisipasi Funding Gap.

6. BAB 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

Berisi mengenai Strategi Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Dan lampiran-lampiran antara lain :

- Lampiran 1 : Hasil Kajian Aspek Non Teknis Dn Lembar Kerja Area Beresiko Sanitasi
- Lampiran 2 : Hasil Analisis Swot
- Lampiran 3 : Tabel Kerangka Kerja
- Lampiran 4 : Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi pendanaan
- Lampiran 5 : Deskripsi Program dan Kegiatan
- Lampiran 6 : Daftar Perusahaan CSR yang Potensial
- Lampiran 7 : Kesiapan Implementasi
- Lampiran 8 : Rencana Kerja Tahunan

BAB 2

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1 Gambaran Wilayah

a. Letak Geografis

Pringsewu dengan ibukota Pringsewu Kabupaten terletak 37 kilometer sebelah barat [Bandar Lampung](#), [ibukota](#) provinsi. Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak pada 104°45'25" - 105°8'42" Bujur Timur (BT) dan 5°8'10" - 5°34'27" Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625,1 km² atau 62.510 Ha.

Secara administrasi Kabupaten Pringsewu dibagi kedalam 9 kecamatan dan memiliki 131 desa/kelurahan dengan luas 62.510 Ha. Untuk lebih jelas mengenai pembagian administrasi dapat dilihat pada tabel 2.2. Sedangkan untuk melihat lebih jelas mengenai batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar 2.1.

Sementara untuk luas wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan data BPS tahun 2014 total wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu 62.500 Ha, dengan total luas wilayah terbangun seluas 10.273 Ha. Terdiri dari 5 Kelurahan yang berada di 1 Kecamatan dan 126 Pekon/ Kampung. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Pekon

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Pekon	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(%) thd total administrasi	(Ha)	(%) thd luas administrasi
Pringsewu	15	5.329	8,52	1.878	35,24
Pagelaran	21	7.247	11,59	2.053	28,32
Gading Rejo	24	8.600	13,76	1.893	22,01
Ambarawa	8	3.099	49,58	632	20,39
Pardasuka	13	9.464	15,14	924	9,76
Adiluwih	11	7.482	11,97	646	8,63
Sukoharjo	16	7.300	11,70	965	13,2
Banyumas	11	3.985	63,76	630	15,8
Pagelaran Utara	10	10.000	16	651	6,51
TOTAL	131	62.500	100	10.273	16,43

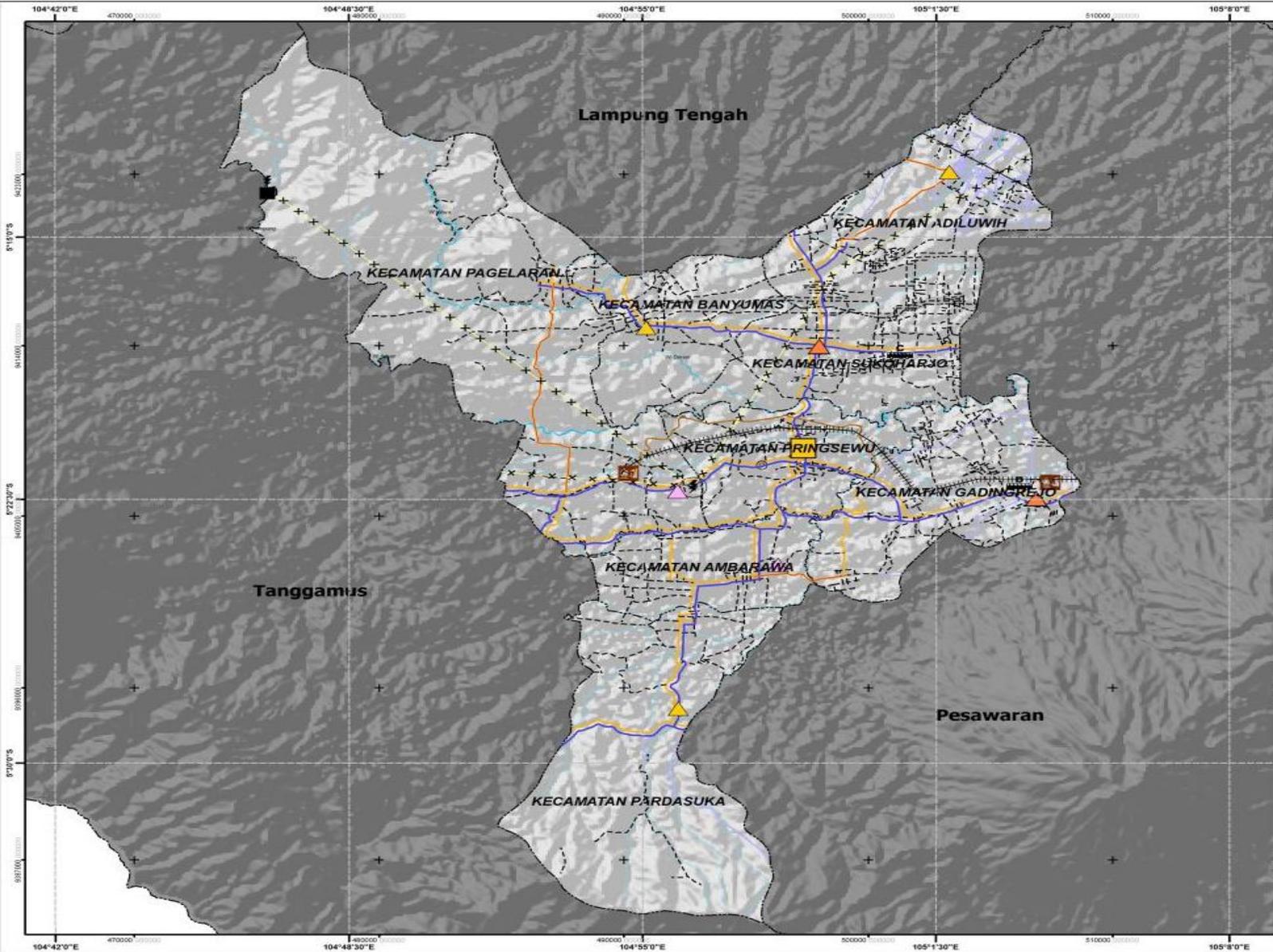
1.1 Wilayah Kajian SSK

Berdasarkan kajian/studi yang telah dilakukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pringsewu yang diantaranya kajian / studi EHRA (Environmental Health Risk Assesment), penentuan area berisiko berdasarkan penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kota/kabupaten. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, buang air besar sembarangan). Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder, diikuti dengan penilaian SKPD dan analisis berdasarkan hasil studi EHRA, Sehingga akan terpetakan area berisiko berdasarkan data sekunder, penilaian SKPD dan hasil studi EHRA yang pada selanjutnya akan tercapai penetapan area berisiko sanitasi untuk Kabupaten Pringsewu. Hasil atau kesimpulan dari kajian/studi yang telah dilakukan ada beberapa desa yang kondisi sanitasinya masuk dalam zona yang berisiko sangat tinggi dan tinggi berada pada empat kecamatan yaitu kecamatan pringsewu, pagelaran, ambarawa dan kec. Pardasuka. sehingga daerah – daerah tersebut merupakan skala prioritas untuk segera ditangani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta 1.1.



Pemutakhiran SSK

Peta Wilayah Kajian SSK



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU

PETA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2011 - 2031

U
1:175,000
Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid U
Datum Horizontal : World Geodetic System
Datum Vertikal : Muka Laut
Satuan Tinggi : Meter

Legenda :

IBUKOTA ADMINISTRASI	BATAS ADMINISTRASI
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kabupaten
● Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan

PERHUBUNGAN

- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lain

Sistem Pusat Kegiatan

- PKWp
- PKLp
- PPK
- PPL

Prasarana

- Stasiun Kereta Api
- Terminal Tipe B
- Terminal Tipe C

PERAIRAN

- Batas Pantai
- Sungai

Jaringan Energi

- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik

Jaringan Energi

- Transmisi Listrik 27
- Transmisi Listrik 15

Jaringan Utilitas

- Utilitas Terpadu

Rencana Jaringan Jalan

- Jalan Lingkungan Menjadi Kolektor
- Jalan Lokal Menjadi Kolektor
- Rencana Jalan Kolektor (Jalan Lingkar)
- Rencana Rel Kereta Api

BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU

SUDARNO EDDI

Sumber

- Peta Rupe Bumi Indonesia Skala 1:50.000, Bakosurtanal
- Bappeda kabupaten Pringsewu, 2010

NO PETA : 18



Pemutakhiran SSK

Kabupaten Pringsewu mempunyai tingkat kepadatan yang cukup tinggi dimana jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu sampai tahun 2015 sebanyak 383.101 jiwa, yang tersebar di 9 Kecamatan antara lain Kecamatan Pringsewu 80.443 jiwa, kecamatan Pagelaran 46.038 jiwa, Kecamatan Gading Rejo 72.249 jiwa, kecamatan Ambarawa 33.732 jiwa kecamatan Pardasuka 33.753 jiwa, Kecamatan Adiluwih 34.401 jiwa, Kecamatan Sukoharjo 47.217, Kecamatan Banyumas 20.068 jiwa dan Kecamatan Pagelaran Utara 15.196 jiwa. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.1 Jumlah penduduk dan kepala keluarga saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk											
	Wilayah Perkotaan											
	Tahun											
	n		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Pringsewu	37.555	9.388	38.310	9.577	38.693	9.673	39.080	9.770	42.988	10.747	43.417	10.854
Pagelaran												
Gading Rejo												
Ambarawa							2.734	683				
Pardasuka							2.966	741				
Banyumas					5.477	1.369						
Adiluwih												
Sukoharjo												
Pagelaran Utara												

Sumber : BPS Kab. Pringsewu, 2015

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk											
	Wilayah Perdesaan											
	Tahun											
	n		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Pringsewu	29,551	7,388	29,846	7,461	30,144	7,536	30,445	7,611	30,749	7,687	31,056	7,764
Pagelaran	46,038	11,509	46,498	11,624	46,963	11,740	47,432	11,858	47,906	11,976	48,385	12,096
Gading Rejo	72,749	18,187	73,476	18,369	74,210	18,552	74,952	18,738	75,701	22,710	76,458	7,764



Pemutakhiran SSK

Nama Kecamatan	JumlahPenduduk											
	Wilayah Perdesaan											
	Tahun											
	n		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Ambarawa	33,732	8,433	34,069	11,509	34,409	7,536	34,753	7,611	35,100	7,687	35,451	7,764
Pardasuka	33,757	8,439	34,094	11,509	34,434	7,536	34,778	7,611	46,038	7,687	46,038	7,764
Banyumas	20,068	5,017	20,268	5,067	20,470	5,117	20,674	5,161	20,880	5,220	21,088	5,273
Adiluwih	34,401	8,600	46,038	7,461	46,498	7,536	46,038	7,611	46,038	7,687	46,038	7,764
Sukoharjo	42,217	1,055	46,038	7,461	46,038	7,536	46,038	7,611	46,962	7,687	47,431	7,764
Pagelaran Utara	15,196	3,799	15,348	7,461	15,501	7,536	15,656	7,611	15,182	7,687	15,970	7,764

Sumber : BPS KabPringsewu 2015

Nama Kecamatan	JumlahPenduduk											
	TOTAL											
	Tahun											
	n		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Pringsewu	67,106	16,776	68,156	17,038	68,837	17,209	69,525	17,381	73,737	18,434	74,473	18,618
Pagelaran	46,038	11,509	46,498	11,624	46,963	11,740	47,432	11,858	47,906	11,976	48,385	12,096
GadingRejo	72,749	18,187	73,476	18,369	74,210	18,552	74,952	18,738	75,701	22,710	76,458	7,764
Ambarawa	33,732	8,433	34,069	11,509	34,409	7,536	37,487	8,294	35,100	7,687	35,451	7,764
Pardasuka	33,757	8,439	34,094	11,509	34,434	7,536	37,744	8,352	46,038	7,687	46,038	7,764
Banyumas	20,068	5,017	20,268	5,067	25,947	6,486	20,674	5,161	20,880	5,220	21,088	5,273
Adiluwih	34,401	8,600	46,038	7,461	46,498	7,536	46,038	7,611	46,038	7,687	46,038	7,764
Sukoharjo	42,217	1,055	46,038	7,461	46,038	7,536	46,038	7,611	46,962	7,687	47,431	7,764
Pagelaran Utara	15,196	3,799	15,348	7,461	15,501	7,536	15,656	7,611	15,182	7,687	15,970	7,764

Sumber : BPS Kab. Pringsewu, 2015

Kepadatan penduduk, Kabupaten Pringsewu yaitu rata-rata 39 jiwa/Ha. Untuk kepadatan paling tinggi terdapat di Kecamatan Ambarawa yaitu sebanyak 56 jiwa/Ha, dan paling rendah di Kecamatan Pagelaran Utara yaitu sebanyak 23 jiwa/ha. Sementara untuk proyeksi kepadatan penduduk lima tahun mendatang dikategorikan sangat tinggi dimana tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu 1,05 persen. Sehingga total total proyeksi penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021 sebanyak 478.876 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Ambarawa yaitu sebanyak 82 jiwa/Ha.

Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.2 Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

NamaKecamatan	Tingkat Pertumbuhan (%)						KepadatanPenduduk (Orang / Ha)					
	Tahun						Tahun					
	n	2017	2018	2019	2020	2021	n	2017	2018	2019	2020	2021
Pringsewu	1,030	1,080	1,100	1,150	1,200	1,250	43	48	53	58	63	70
Pagelaran	1,010	1,060	1,100	1,150	1,200	1,250	23	28	33	38	43	50
GadingRejo	1,010	1,010	1,100	1,150	1,200	1,250	42	48	53	58	61	67
Ambarawa	1,058	1,058	1,100	1,150	1,200	1,250	56	61	66	71	76	82
Pardasuka	1,025	1,025	1,100	1,150	1,200	1,250	36	41	46	51	56	61
Banyumas	1,021	1,021	1,100	1,150	1,200	1,250	36	41	46	51	57	63
Adiluwih	1,005	1,005	1,100	1,150	1,200	1,250	50	55	60	65	70	75
Sukoharjo	1,002	1,019	1,100	1,150	1,200	1,250	53	58	63	68	73	76
Pagelaran Utara	1,005	1,005	1,100	1,150	1,200	1,250	23	28	33	38	42	47

Sumber : RTRW Kab. Pringsewu, 2012

Didalam wilayah Kabupaten umumnya terdapat wilayah-wilayah atau kantung-kantung kemiskinan, begitujugadenganKabupatenPringsewu. Berdasarkan data BPS tapa tahun 2015, jumlah penduduk miskin di KabupatenPringsewu sebanyak 31.552 jiwa atau sebesar 8,2 Persen dari total penduduk KabupatenPringsewu.

Penduduk miskin KabupatenPringsewu umumnya terdapat di wilayah pinggiran yang memanfaatkan lahan untuk permukiman mereka.

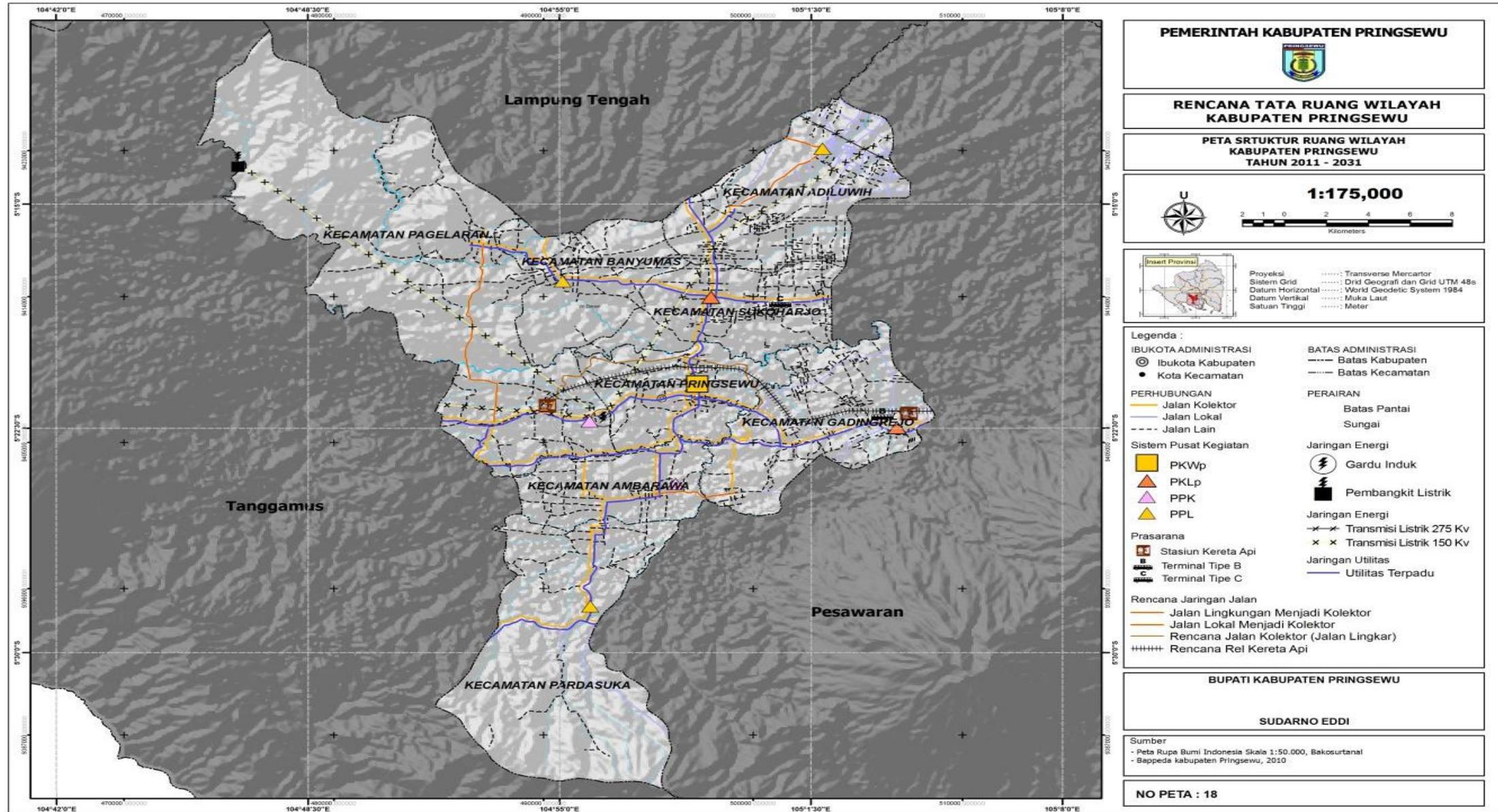
Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.3 Jumlah penduduk miskin per kecamatan

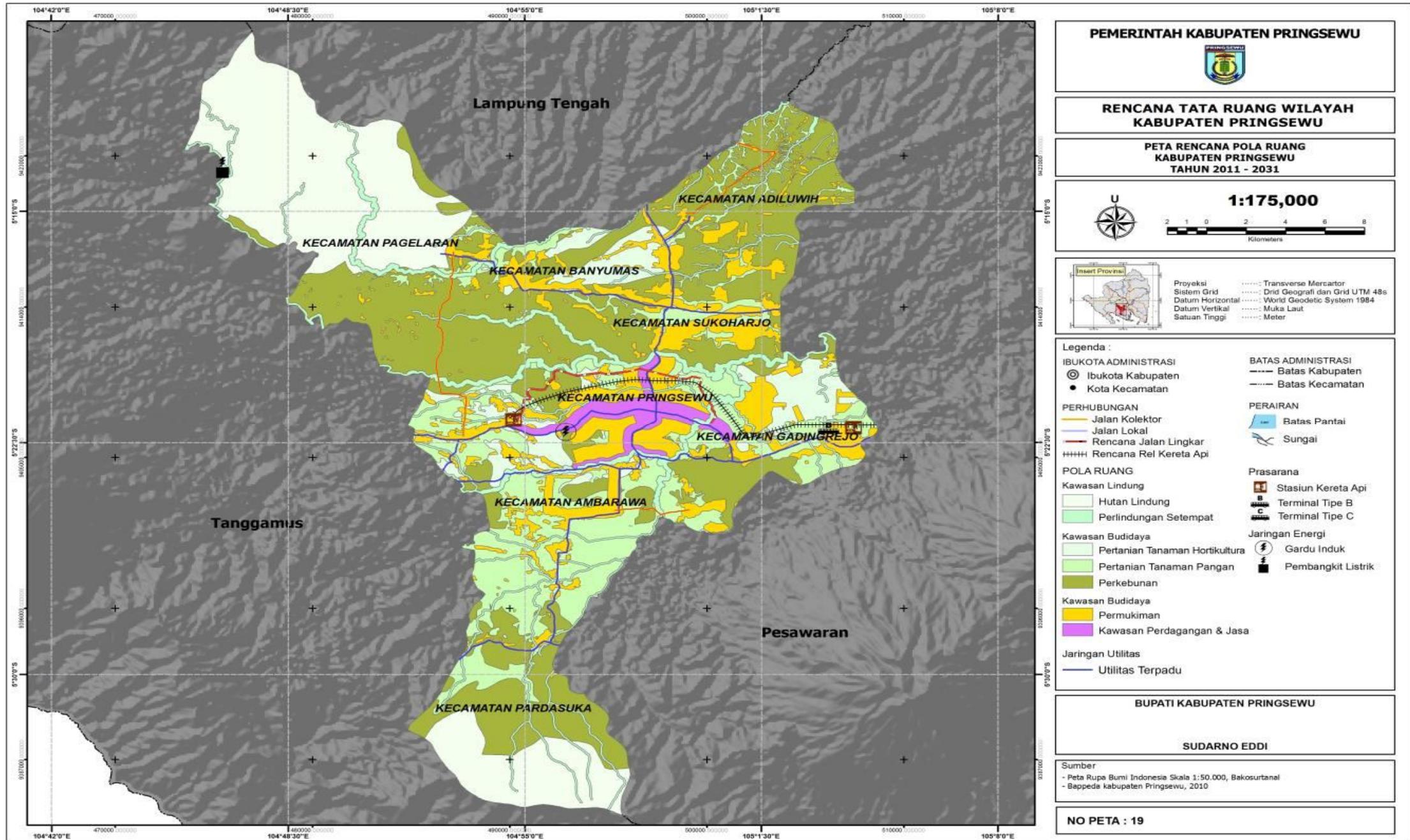
Nama Kecamatan	Jumlah keluarga miskin (KK)
Pringsewu	6.184
Pagelaran	3.638
GadingRejo	3.798
Ambarawa	3.532
Pardasuka	2.905
Banyumas	1.772
Adiluwih	2.238
Sukoharjo	3.632
Pagelaran Utara	1.868

Sumber :Pringsewudalamangka : 2015

Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota



Gambar 2.3 Peta Rencana pola ruang Kabupaten/Kota



2.2 Kemajuan Pelaksanaan SSK

a. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tabel. 2.4 Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Air Limbah Domestik

SSK (periode sebelumnya) Tahun 2012 –2016			SSK (saat ini)
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Tercapainya Standar pelayanan minimum (SPM) untuk layanan air limbah domestik tahun 2017</p> <p>Meningkatkan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih di Kab. Pringsewu melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga yang berwawasan lingkungan.</p>	<p>1. Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala perkotaan pada akhir tahun 2015.</p> <p>2. Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septic dari 44,3% menjadi 66% untuk rumah tangga miskin pada akhir tahun 2015.</p> <p>3. Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal 10 unit di wilayah padat, kumuh, miskin di akhir tahun 2015.</p> <p>4. Tersedianya dan berfungsinya IPAL Komunal untuk 3 unit di tahun 2015</p>		<p>Sudah tersedia Masterplan Air Limbah Tahun 2014</p> <p>42,2 % penduduk belum mempunyai akses jamban sehat</p> <p>Sudah terbangun 20 Unit MCK++ yang berlokasi sebagian di kawasan Area Beresiko</p> <p>Tidak tercapai</p>

b. Pengelolaan Persampahan Domestik

Tabel. 2.5 Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Persampahan

SSK (periode sebelumnya) Thn 2012 – Thn 2016			SSK (saat ini)
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih di Kab. Pringsewu melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan. Adanya kegiatan masyarakat untuk mengolah sampah</p>	<p>1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.</p> <p>2. Meningkatnya efektifitas layanan pengelolaan persampahan dari 13% menjadi 50% pada akhir tahun 2015.</p> <p>3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R skala rumah tangga dari 1% menjadi 5% pada tahun 2015.</p>	<p>20% penduduk belum terlayani oleh pelayanan persampahan tingkat kota.</p>	<p>Pengelolaan persampahan dari TPS ke TPA baru 30 M3/hari</p> <p>Belum Tercapai</p> <p>- Belum Tercapai</p>

c. Drainase Perkotaan

Tabel. 2.6 Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Drainase Perkotaan

SSK (periode sebelumnya) Thn 2012- Thn 2016			SSK (saat ini)
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih di Kab. Pringsewu melalui penyediaan sarana dan prasarana drainase.	1. Tersedianya dokumen perencanaan sistem drainase kota yang terintegrasi di akhir tahun 2015. 2. Berkurangnya luas genangan di Kabupaten Pringsewu dari 7 titik genangan menjadi 4 titik genangan dengan memprioritaskan penanganan di wilayah permukiman di akhir tahun 2015.		Tersedianya Review Master Plan Drainase Tahun 2015 Masih ada 3 titik genangan di Kabupaten Pringsewu

2.3 Profil Sanitasi Saat Ini

a. Air Limbah Domestik

(1) Sistem dan infrastruktur

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu baru ada sistem setempat (On-site) , sedangkan untuk sistem terpusat (Off-site) belum ada. Sistem pengelolaan air limbah domestik untuk sistem (On-site) yang ada berupa pembangunan MCK++ dan IPAL Komunal, data bisa dilihat pada tabel :

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun
1	Pembangunan MCK++	Pekon Pardasuka Timur	2010
2	Pembangunan MCK++	Pekon Pujodadi	2011
3	Pembangunan MCK++	Pekon Pardasuka	2011
4	Pembangunan MCK++	Pekon Wway Ngison	2012
5	Pembangunan MCK++	Pekon Sukoharjo-III	2012
6	Pembangunan MCK++	Pekon Waluyo jati	2012
7	Pembangunan MCK++	Pekon Klaten	2012
8	Pembangunan MCK++	Pekon Jati Agung	2013
9	Pembangunan MCK++	Pekon Purwodadi	2013
10	Pembangunan MCK++	Pekon Sinar Waya	2013
11	Pembangunan MCK++	Pekon Selapan	2013
12	Pembangunan MCK++	Pekon Purwodadi	2014
13	Pembangunan MCK++	Pekon Tulung Agung	2014
14	Pembangunan MCK++	Pekon Sinar Baru Timur	2014
15	Pembangunan MCK++	Pekon Mulyorejo	2014
16	Pembangunan MCK++	Pekon Margakaya	2015
17	Pembangunan MCK++	Pekon Adiluwih	2015
18	Pembangunan MCK++	Pekon Bulukarto	2015
19	Pembangunan MCK++	Pekon Karangsari	2015
20	Pembangunan MCK++	Pekon Banyuwangi	2015

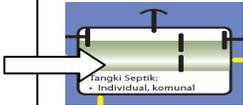
Sementara untuk sistem setempat saat ini Kabupaten Pringsewu sedang membangun IPAL serta kepemilikan tanksi septic dirumah-rumah penduduk, data bisa dilihat pada tabel :

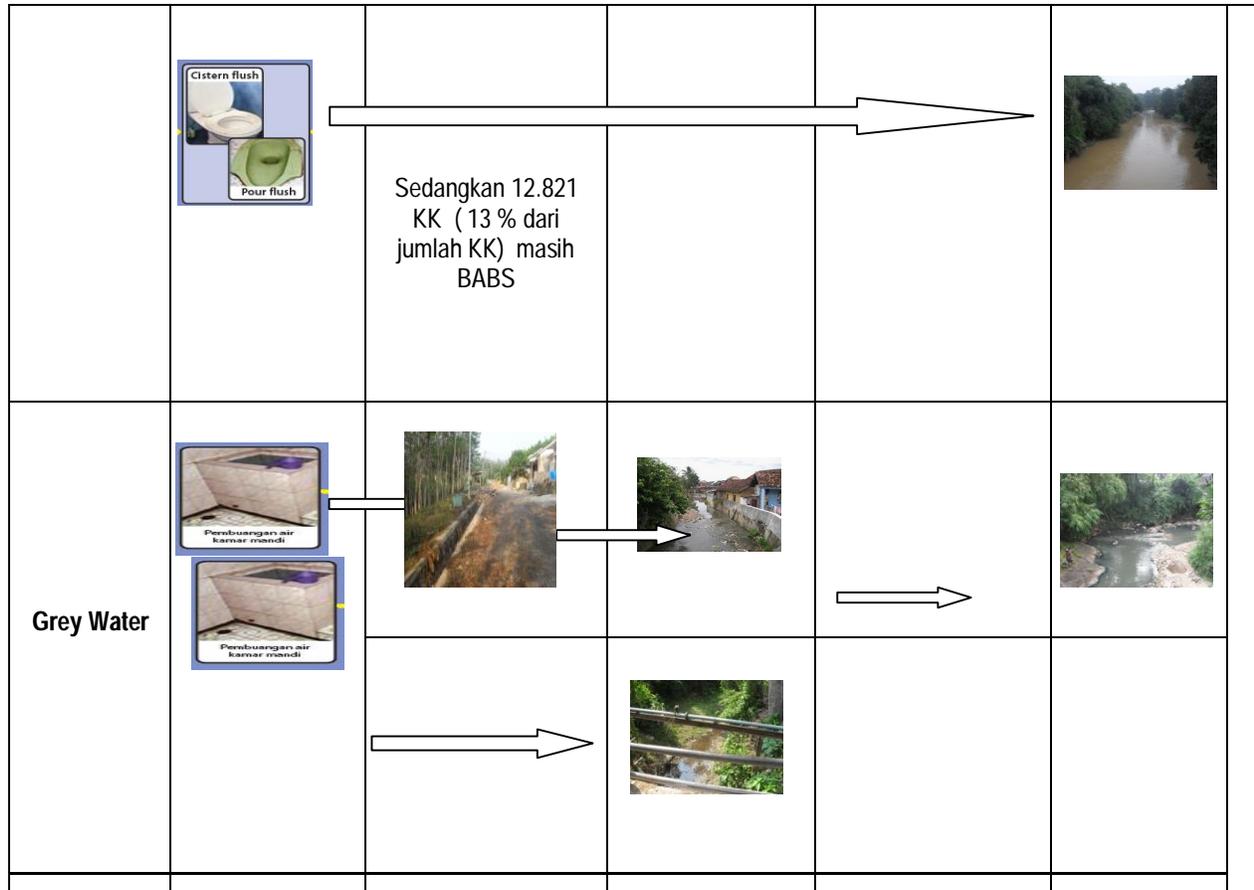
Jumlah penduduk yang masih BABS di Kabupaten Pringsewu yaitu sebanyak 12.821 KK atau 21,2% dari total penduduk Kabupaten Pringsewu yang sudah mencapai 79.464 KK pada tahun 2016.

Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengelolaan sistem setempat dikabupaten Pringsewu, bisa dilihat pada DSS dibawah ini :

Tabel 2.7 : Sistem Pengelolaan Air Ilimbah setempat

Input	User Interface	Penampungan Awal	Pengaliran	Pengolahan Akhir Terpusat	Pembuangan/ Akhir
Black Water		 <p>Tangki Septik: • Individual, komunal</p> <p>mengalirkan limbah tinja ke Tangki Septic</p>			
		 <p>Tangki Septik: • Individual, komunal</p>	 <p>Yang punya Tangki septik, baru 9,4% (9.233 KK) yang Tangki Septiknya dikuras/ disedot</p>	 <p>PLT</p>	
	Kloset tanpa leher angsa	 <p>Cubluk</p>	Sebanyak 28.697 KK (29,2% dari jumlah KK) masih menggunakan cubluk. Untuk daerah kota sebanyak 5468 KK dan daerah pedesaan sebanyak 23.229 KK		



Pengelolaan limbah kakus di lingkungan permukiman banyak ditangani sendiri oleh masyarakat. Masyarakat lebih cenderung memilih cara untuk membangun tangki septik yang baru setelah tangki septik yang lama sudah terisi penuh. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan pencemaran air tanah terutama pada sumur-sumur dangkal di permukiman warga.

Sarana truk tinja yang menjadi armada untuk penguras septik tank baru ada pada tahun 2014, yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan berjumlah 1 unit, sedangkan yang dikelola swasta ada 3 unit. Sarana truk tinja tersebut belum difungsikan, karena belum dibentuk perda tentang Air Limbah dan Unit Pengelola. Teknis (UPT).. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat timbulan / volume tinja semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu. Sarana IPLT yang ada belum berfungsi maksimal.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga belum memiliki peraturan dan belum melaksanakan pengawasan terhadap dimensi atau standar ukuran septic-tank dan sistem rembesan setempat. Oleh sebab itu, saluran drainase kota yang pada umumnya berupa alur sungai alami menjadi tempat pembuangan effluent dari *septic-tank* serta air limbah kamar mandi dan dapur

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2015 timbulan / volume tinja di Kabupaten Pringsewu diperkirakan akan mencapai jumlah 1.826 m³/tahun. Untuk mencegah timbulnya permasalahan seputar sanitasi masyarakat hingga tahun 2015 setidaknya diperlukan truk tinja berukuran 3 m³ sebanyak 4 unit.

Tabel 2.7 Cakupan layanan air limbah domestik saat ini di Kabupaten/Kota

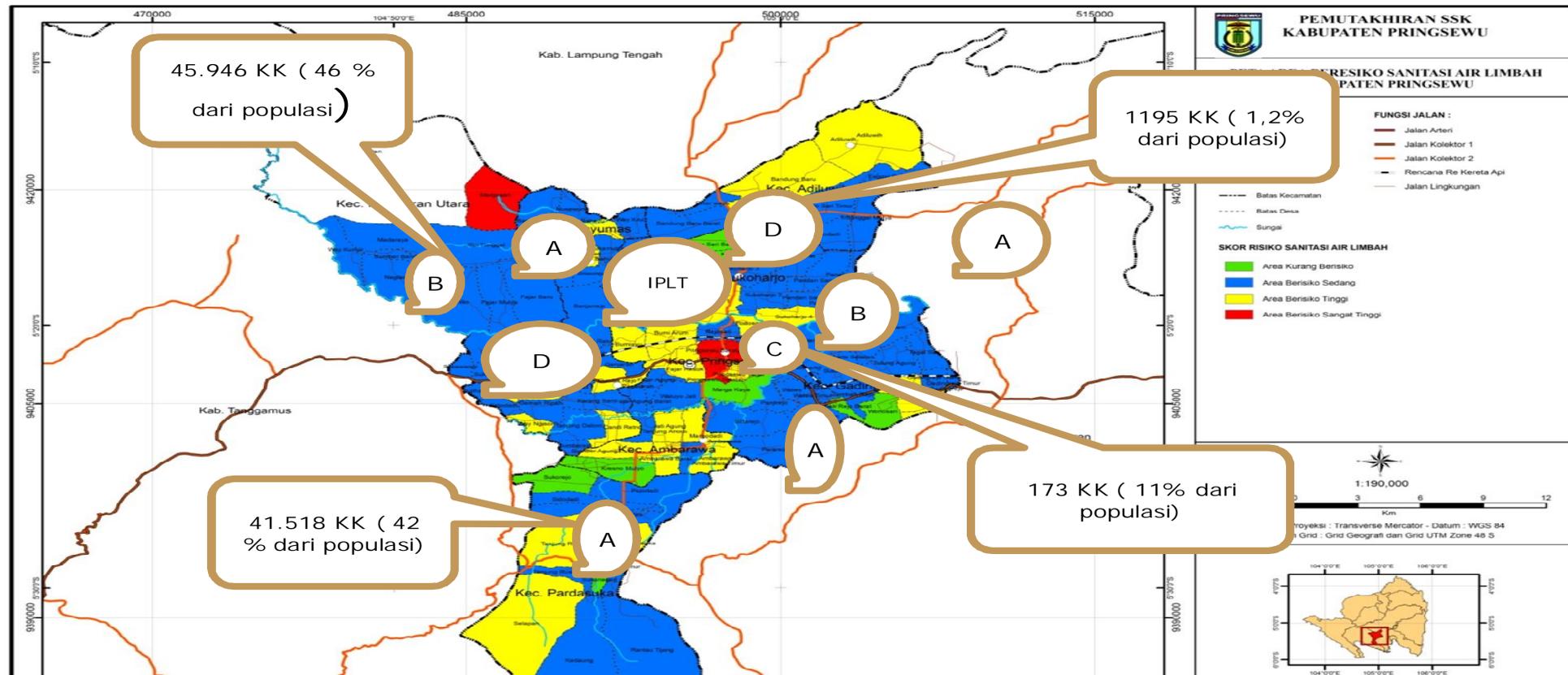
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Akses Layak (KK)							Akses Dasar (KK)		
			On-Site			Off-Site				Tangki Septik Individual	Cubluk	BABS (KK)
			Tangki Septik Individual	Tangki Septik Komunal ($\leq 10\text{KK}$)	MCK++	Tangki Septik Komunal ($\geq 10\text{KK}$)	IPAL Komunal	IPAL Kawasan	IPAL Kota			
1	Pringsewu	80.443	6.589	0	2	0	0	0	0		8.343	2.294
2	Ambarawa	33.732	3.242	0	1	0	0	0	0		1.116	4.371
3	Pagelaran	46.038	5.681	0	2	0	0	0	0		3.585	1.159
4	Pardasuka	33.757	3.245	0	4	0	0	0	0		1.862	1.211
5	Gadingrejo	72.249	11.509	0	3	0	0	0	0		3.404	1.758
6	Sukoharjo	47.217	6.052	0	2	0	0	0	0		2.937	1.508
7	Banyumas	20.068	2.588	0	2	0	0	0	0		2.074	27
8	Adiluwih	34.401	4.335	0	0	0	0	0	0		3.545	71
9	Pagelaran Utara	15.196	1.606	0				0	0		1.362	332

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi, 2016

Tabel 2.8 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Keterangan
				Berfungsi	Tidak berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
SPAL Setempat (Sistem Onsite)						
1	Tangki Septik Komunal < 10 KK					
	MCK++	unit	20	20		
2.	Truk Tinja	unit	4	3	1	3 milik swasta
3	IPLT : kapasitas	M3/hari	30			Belum berfungsi maksimal
SPAL Terpusat (Sistem Offsite)						
1	Tangki Septik Komunal > 10 KK		0			
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	0			
	- IPAL Komunal	unit	3			Masih dikerjakan/ Luncuran 2015
2	IPAL Kawasan/Terpusat	orang				
	- kapasitas	M3/hari				
	- sistem					

HASIL PEMETAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Sistem A Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
Sistem B Sistem setempat (onsite)
Sistem C Sistem Terpusat
Sistem D Sistem Komunal



(1) Kelembagaan dan Peraturan

1. Kebijakan yang mengatur pengelolaan air limbah di Kabupaten Pringsewu adalah :
 - Perda Kabupaten Pringsewu No.9 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - Perda Kabupaten Pringsewu No.12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan .
 - Keputusan Bupati Pringsewu No. B/110/KPTS/D.02 tentang Forum Kabupaten Pringsewu Sehat tanggal 30 April 2012 ..
 - Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat di lingkungan pemukiman rumah tangga/individu untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik (baik untuk grey water maupun black water) yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup.
 - Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal.

b. Persampahan

(1) Sistem dan infrastruktur

- Cara pengumpulan sampah, mengumpulkan sampah dari sumber sampah untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) dan atau ke tempat pemrosesan akhir (TPA dimana dalam pelaksanaannya ada yang disebut pelayanan individu dan pelayanan komunal.
- Pada pelayanan individu pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan dengan mendatangi tiap rumah, sebagai alat pengumpul dapat berupa gerobak sampah dengan volume 1m³ sering disebut juga pelayanan door to door dengan jenis kendaraan angkut jarak pendek. Sampah yang dikumpulkan dibawa ke tempat penampungan sementara sebelum sampah tersebut dibuang di tempat pemrosesan akhir (TPA). Selain gerobak, kendaraan lain yang dipergunakan untuk mengangkut sampah pada pelayanan individual adalah mobil pick up dan dump truck disebut juga pelayanan door to door dengan kendaraan jarak jauh dimana sampah dikumpulkan dari tempat pewardahan (sumber sampah) ke tempat pemrosesan akhir.
- Pelayanan komunal dimana pengumpulan sampah dilakukan oleh masing-masing penghuni rumah dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan oleh DKP berupa container. Pelayanan seperti ini diperuntukan pada daerah yang belum teratur (Slum Area) dan pada daerah yang jalan lingkungannya kecil (tidak dapat dilalui gerobak sampah).
- Kabupaten Pringsewu memiliki 18 tempat penampungan sementara yang tersebar di wilayah. Masing-masing TPS dilengkapi dengan container.
- TPA berlokasi di Kecamatan Pringsewu Pekon Bumi Ayu, dengan luas areal ± 3,5 Ha , pengoperasiannya masih menggunakan sistem open dumping.
- Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah belum optimal.



Tabel. 2.9 Tabel Timbunan sampah per kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbunan Sampah									
		Sampah Dikelola Mandiri di Sumber		Sampah Terproses (3R)		Sampah Terangkut ke TPA		Sampah Tidak Terproses		Total	
		(%)	(M3/hari)	(%)	(M3/hari)	(%)	(M3/hari)	(%)	(M3/hari)	(%)	(M3/hari)
Pringsewu	80.443	0	0	0	0	54	65	45	54	45	54
Ambarawa	33.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagelaran	46.038	0	0	5	4	5	35	0	0	5	35
Pardasuka	33.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gadingrejo	72.249	0	0	7	8	25	27	0	0	25	27
Sukoharjo	47.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banyumas	20.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiluwih	34.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagelaran Utara	15.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

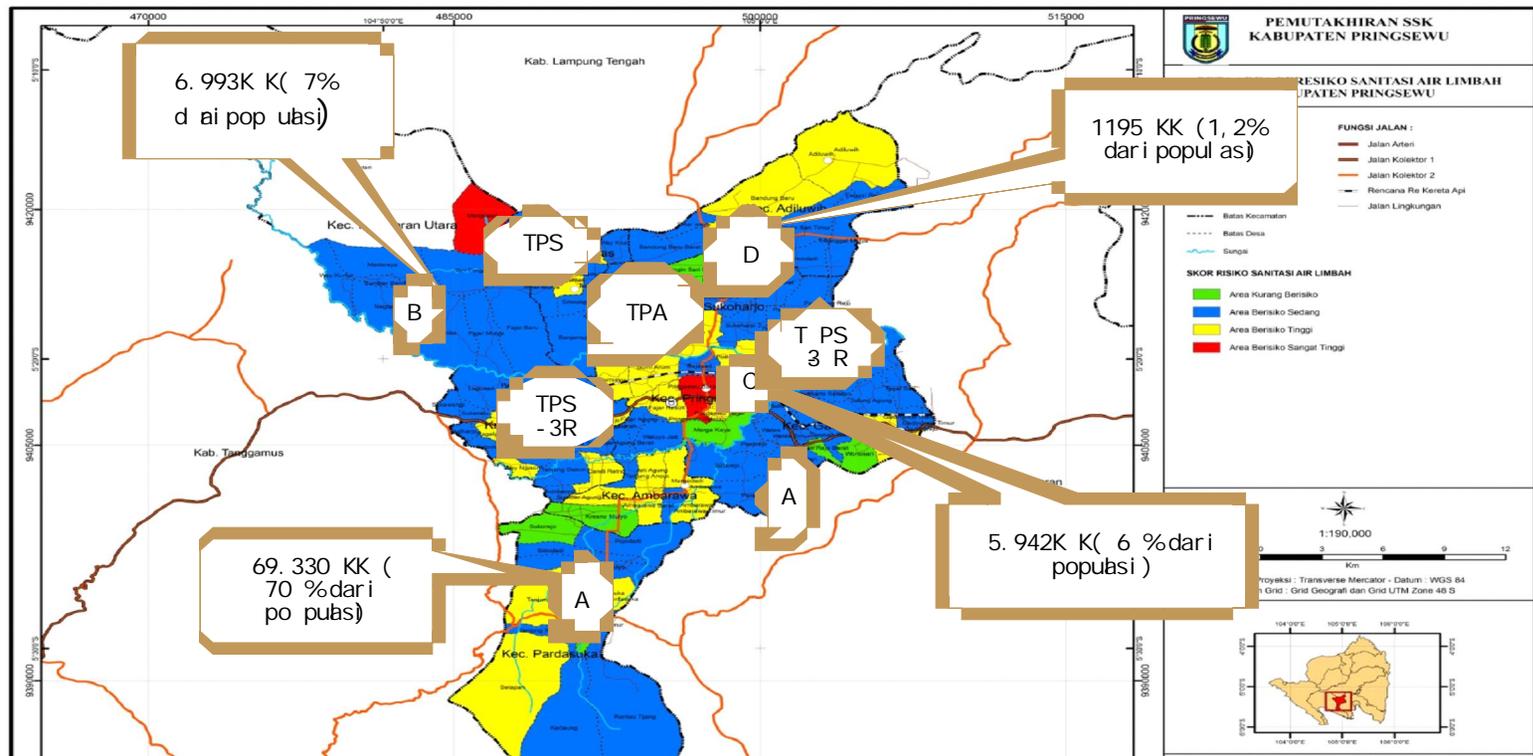
Sumber : Instrumen Profil Sanitasi, 2016

Tabel. 2.10 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Jumlah/ luas total terpakai	Kapasitas / daya tampung*	Ritasi /hari	Kondisi			Keterangan**
				M3		Baik	Rusakrin gan	Rusak Berat	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
1	Pengumpulan Setempat								
	- Gerobak	unit	80	1	2	65		15	
	- Becak/Becak Motor	unit							
	- Kendaraan Pick Up	unit	1	2	5	1			
2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)								
	- Bak sampah (beton/kayu/fiber)	unit			-				
	- Container	unit	18	4	-	12	4	2	
	- Transfer Stasiun	unit			-				
	- SPA (Stasiun Peralihan Antara)	unit			-				
3.	Pengangkutan								
	- Dump Truck	unit							
	- Arm Roll Truck	unit	4	4	4	3		1	
	- Compactor Truck	unit							
4	Pengolahan Sampah								
	- Sistem 3R	unit	2		-				
	- Incinerator	unit							
5	TPA/TPA Regional <u>Konstruksi</u> :lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka <u>Operasional</u> :lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka								
	- Luas total TPA yg terpakai	Ha	1		-				
	- Luas sel Landfill	Ha			-				
	- Daya tampung TPA	(M3/hari)		1.000	-				
6	Alat Berat								
	- Bulldozer	unit			-				
	- Whell/truck loader	unit			-				
	- Excavator / backhoe	unit	1		-	v			
	- Truk tanah	unit							
7	IPL: Sistem kolam/aerasi/..... Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD):								
	- Efluen di Inlet								
	- Efluen di Outlet								

HASIL PEMETAAN PERSAMPAHAN

- Sistem A. Pengelolaan Berbasis Masyarakat
- Sistem B.. Layanan Langsung dan penyapuan jalan
- Sistem C . Layanan tidak langsung (RT – TPS – TPA)
- Sistem D . Sistem 3 R



Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Ada 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu; 1). Tata guna lahan/klasifikasi wilayah : komersial/ Central of Business Development (CBD), pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb; 2). Kepadatan penduduk. Berdasarkan kriteria penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Pringsewu terdapat 2 zona penanganan yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- **Zona 1**, merupakan area yang harus terlayani dengan sistem cakupan secukupnya terdapat di Kecamatan Pagelaran antara lain : Candi Retno, Tanjung Dalam, Way Ngison, Karang Sari, Patoman, Pagelaran, Kecamatan Sukoharjo yaitu Kelurahan Pandan Surat, Kecamatan Banyumas yaitu Kelurahan Banyuwangi, Kecamatan Adiluwih yaitu Kelurahan Adiluwih, Kecamatan Gadingrejo yaitu Kelurahan Tambah Rejo, Kecamatan Pringsewu yaitu Kelurahan Fajar Agung, Kecamatan Pardasuka yaitu Kelurahan Wargomulyo, dan Kecamatan Ambarawa yaitu Kelurahan Tanjung Anom
- **Zona 2**, Hampir diseluruh Kabupaten Pringsewu untuk permasalahan persampahan mesti ditangani dengan cara sistem tidak langsung coverage yaitu terdapat di seluruh kecamatan : Kecamatan Pagelaran Gumuk Mas, Suka Ratu, Suka Wangi, Lugu Sari, Panutan, Bumi Ratu, Fajar Baru, Kemilin, Neglasari, Sumber Bandung, Giri Tunggal, Margo sari, Gemah Ripah, Pamenang, Fajar Mulia, Madaraya, Pasir Ukir, Gumuk Rejo, Kecamatan Sukoharjo antara lain Kelurahan Sinar Baru, Sukoharjo I, Sukoharjo II, Sukoharjo IV, Sukoharjo III, Keputran, Sukoyoso, Siliwangi, Waringinsari Barat, Pandan Sari Selatan, Kecamatan Banyumas antara lain Kelurahan Wayakrui, Sri Rahayu, Nusawungu, Sukamulya, Banjarejo, Sriwungu, Banyumas, Sinarmulya, Kecamatan Adiluwih antara lain Kelurahan Sinarwaya, Bandung Baru, Waringinsari Timur, Tritunggal Mulya, Sukoharum, Enggal Rejo, Purwodadi, Kecamatan Gadingrejo antara lain Kelurahan Parerejo, Blitarejo, Panjerejo, Bulukarto, Wates, Bulurejo, Wonodadi, Gading Rejo, Tegal Sari, Tulung Agung, Yogyakarta, Kediri, Mataram, Wonosari, Kecamatan Pringsewu antara lain Kelurahan Margakaya, Waluyojati, Pajaresuk, Sidoharjo, Podomoro, Bumiarm, Rejosari, Pringsewu Utara, Pringsewu Selatan, Pringsewu Timur, Pringsewu Barat, Bumiayu, Kecamatan Pardasuka antara lain Kelurahan Selapan, Kedaung, Sukanegeri, Rantau Tijang, Pardasuka, Tanjung Rusia, Pujodadi, Sukorejo, Sidodadi, Pardasuka Timur, Tanjung Rusia, Kecamatan Ambarawa antara lain Kelurahan Ambarawa, Ambarawa Barat, Margodadi, Jati Agung, Sumber Agung, Kresnomulyo

Berdasarkan zonasi persampahan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Pringsewu dan kemampuan daerah di dalam Grand Strategy indikator sasaran seluruh sentra ekonomi memiliki sarana listrik, air bersih, akses transportasi yang lancar, irigasi, sanitasi, persampahan dan drainase yang handal di Dinas Pekerjaan Umum untuk persampahan adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian zona pengembangan sanitasi subsector persampahan dapat dilihat pada peta 2.2.

2. Kelembagaan dan Peraturan

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang diarahkan untuk pengelolaan persampahan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Berdasarkan Perda tersebut, yang terkena objek retribusi meliputi: pedagang kaki lima, pasar/fasilitas umum, industri dan kantor/usaha perdagangan.
2. Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal.

3. Dalam menentukan arah kebijakan perencanaan strategis, DKP merencanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kemitraan dan partisipasi masyarakat
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan pertamanan dalam lingkup makro
 - c. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam bidang kebersihan dan keindahan kota
 - d. Peningkatan kualitas pengolahan sampah di TPA dengan mengarahkan penerapan Sanitary Landfill
 - e. Pengelolaan kebersihan yang berbasis pada sumber sampah rumah tangga.
4. Ada beberapa hal yang dapat menggambarkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pringsewu belum menjangkau masa depan dimana :
 - Pola pikir saat ini pengelolaan persampahan di Kabupaten Pringsewu hanya merupakan tanggung jawab DKP saja, sehingga perlu adanya perubahan pola pikir tersebut bahwa tanggung jawab pengelolaan persampahan merupakan tanggung jawab bersama. Perubahan ini dapat dilakukan melalui optimalisasi kerjasama antar SKPD/OPD bersama masyarakat.
 - Menambah sarana dan merubah pola pikir pengelolaan dengan berdasarkan tujuan skala kebutuhan dan skala teknis berupa peremajaan TPS-TPS yang sudah tidak layak pakai, penyediaan/penambahan TPS yang terpilah (organik / anorganik) sesuai dengan kebutuhan, penambahan komposter, pemanfaatan sarana pemilahan sampah dan pengomposan (saat ini belum berjalan dengan maksimal)

Pola pikir mengenai kebutuhan pengelolaan persampahan belum sepenuhnya berdasarkan permintaan dari petugas lapangan / masyarakat (bottom-up)

c. Drainase Perkotaan

Sistem drainase kota Pringsewu merupakan drainase permukaan yang pengalirannya mengaplikasikan sistem gravitasi. Kota Pringsewu dilalui oleh beberapa sungai (orde 1, orde 2, dan orde 3). Sungai - sungai tersebut difungsikan sebagai badan penerima air, sedangkan drainase primer, skunder, dan tersier berupa saluran terbuka berbentuk trapesium maupun persegi dan saluran-saluran tertutup yang dibuat disepanjang kanan kiri jalan. Badan penerima air dalam sistem drainase kota Pringsewu adalah drainase alam, yaitu sungai dan anak sungai yang berfungsi sebagai sistem penerima air buangan dari saluran primer, sekunder, dan tersier yang ada.

Sistem tersebut berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air hujan dan air limbah rumah tangga (*grey water*). Saluran-saluran tersier dan skunder berfungsi mengalirkan air hujan dan air limbah rumah tangga di daerah kota yang pembuangannya ke saluran primer diteruskan ke sungai-sungai terdekat yang terdapat di sekitarnya. Saluran primer ini sebagian besar merupakan saluran pasangan batu atau permanen berbentuk persegi yang di atasnya telah ditutup oleh fasilitas trotoar, sebagian lagi saluran terbuka yang berbentuk trapesium dengan dimensi yang bervariasi untuk setiap ruas jalan, sebagian masih berupa drainase alam yang ada di tiap -tiap daerah yang rendah. Untuk saluran tertutup/trotoar kondisinya masih relative baik,

sedangkan untuk saluran terbuka sebagian telah rusak. Untuk saluran tanah sebagian besar terjadi pendangkalan yang disebabkan oleh tergerusnya tanah di sisi salura

Masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan pengelolaan drainase di Kabupaten Pringsewu terdiri dari :

- Pada wilayah perkotaan, Kabupaten Pringsewu merupakan areal lahan yang datar dengan kemiringan 0 – 8%..
- Kabupaten Pringsewu merupakan daerah Cekungan Air Tanah (CAT) adalah: suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis.l.
- Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan belum optimal.
- Masih adanya masyarakat yang kurang bijaksana dalam memaknai fungsi drainase, diantaranya pembuangan sampah di saluran drainase.
- Kondisi serta pemanfaatan saluran drainase yang kurang baik menyebabkan pada musim penghujan sering terjadi genangan di beberapa tempat di Kabupaten Pringsewu.

1. Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan

Lokasi genangan di Kabupaten Pringsewu berdasarkan definis Standar Pelayanan Minimum (SPM) antara lain terdapat 7 titik rawan genangan. Lebih jelas bisa dilihat didalam tabel dib Tabel 2.11 Lokasi Genangang di Kabupaten Pringsewu

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab***	Infrastruktur*	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi		Jenis	Keterangan**
		(Ha)	(M)	(jam /hari)	(kali /tahun)			
1	Tugu Pemuda	0,5	0.3	2	2	Kesulitan drinase menampung limpasan, akibat hujan lebat	Permukiman Padat, Pertokoan	
2	Jl. KH.Ghalib lokasi 1. Depan ke arah Desa Podomoro	0,5	0,2	2	1	Kesulitan drinase menampung limpasan, akibat hujan lebat	Permukiman Padat, Pertokoan	
3	JL. KH. Ghalib lokasi.2 depan Stikes	1	0,3	3	2	Saluran Irigasi tidak berfungsi	Permukiman Padat, Pertokoan, Lahan pertanian	
4	Jln. KH. Ghalib lokasi.3 depan Gg. Dahlia	1	0,4	2	2	Saluran Irigasi tidak berfungsi	Permukiman Padat, Pertokoan	

							n,Lahan pertania n	
5	Jln. Kartini samping BRI	2	0,3	2	2	Kesulitan drinase menampung limpasan,akibat hujan lebat	Permukiman Padat, Pertkantaran	
6	Jl.Amad Yani depan RS.Mitra Husada	1,5	0,5	2	2	Kesulitan drinase menampung limpasan,akibat hujan lebat	Permukiman Padat, Pertokoan	
7	Jl. Kearah terminal/pasar Sarinongko	0,5	0,5	2	2	Kesulitan drinase menampung limpasan,akibat hujan lebat	Permukiman Padat, Pertokoan	
8	Jl. Sudirman sekitar Masjid Taqwa	1,5	0,5	2	2	Kesulitan drinase menampung limpasan,akibat hujan lebat	Permukiman Padat, Pertokoan	

2. Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2.12 Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten Pringsewu

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/ tahun)
				B**	H***	Berfungsi	Tdk berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)			(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	Saluran Primer							
1	- S. Primer Way Sidoarjo	m	Travesium	240	180	v		1
2	- S. Primer							
	- S Primer Way Semah	m	Travesium	200	150	v		1
	-							

Sumber : Review Masterplan Drainase , 2014

3. Kelembagaan dan Peraturan

- o Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang diarahkan untuk menegaskan kewajiban masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan.
- o Kondisi penegakkan hukum / aturan masih belum optimal.

2.4 Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

Berdasarkan, Data Sekunder, maka untuk area berisiko di wilayah Kabupaten Pringsewu bisa dilihat pada tabel dan gambar di bawah.

a. Area berisiko dan permasalahan air limbah domestik

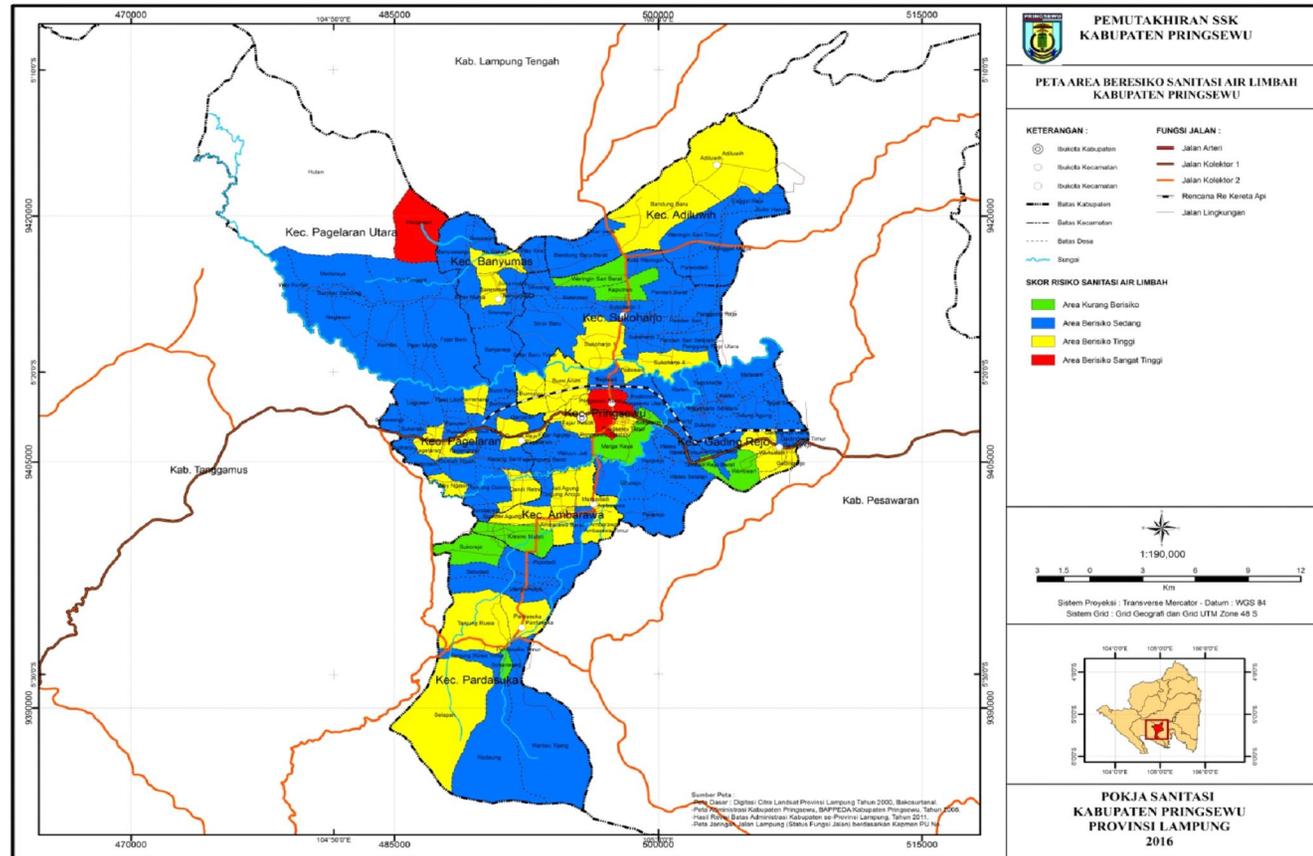
Area Beresiko sanitasi untuk sektor air limbah domestik bisa dilihat dibawah.

Berdasarkan hasil study Environmental Health Risk Assessment (EHRA), maka didapat area beresiko sanitasi. Study EHRA sendiri dilaksanakan untuk mengukur sejauhmana kondisi dan permasalahan lingkungan yang terjadi ditingat rumah tangga, dengan korensponden yiatu ibu rumah tangga atau anak perempuan yang sudah menikah atau berumur diatas 17 tahun.

Hasil study EHRA didapat untuk area beresiko sanitasi pada sektor air limbah yaitu sebanyak empat kelurahan yang mengalami resiko sangat tinggi antara lain kelurahan Kelurahan Pringsewu Utara, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kelurahan Pringsewu Barat, Pekon Margosari sementara pekon yang lain berada di area beresiko tinggi, sedang dan rendah.

Untuk lebih jelasnya mengenai peta wilayah area beresiko sanitasi untuk sektor air limbah bisa dilihat tabel dibawah.

Gambar 2.7 Peta Area Beresiko sanitasi Air Limbah Domestik



Tabel 2.13 Area berisiko sanitasi Air Limbah Domestik

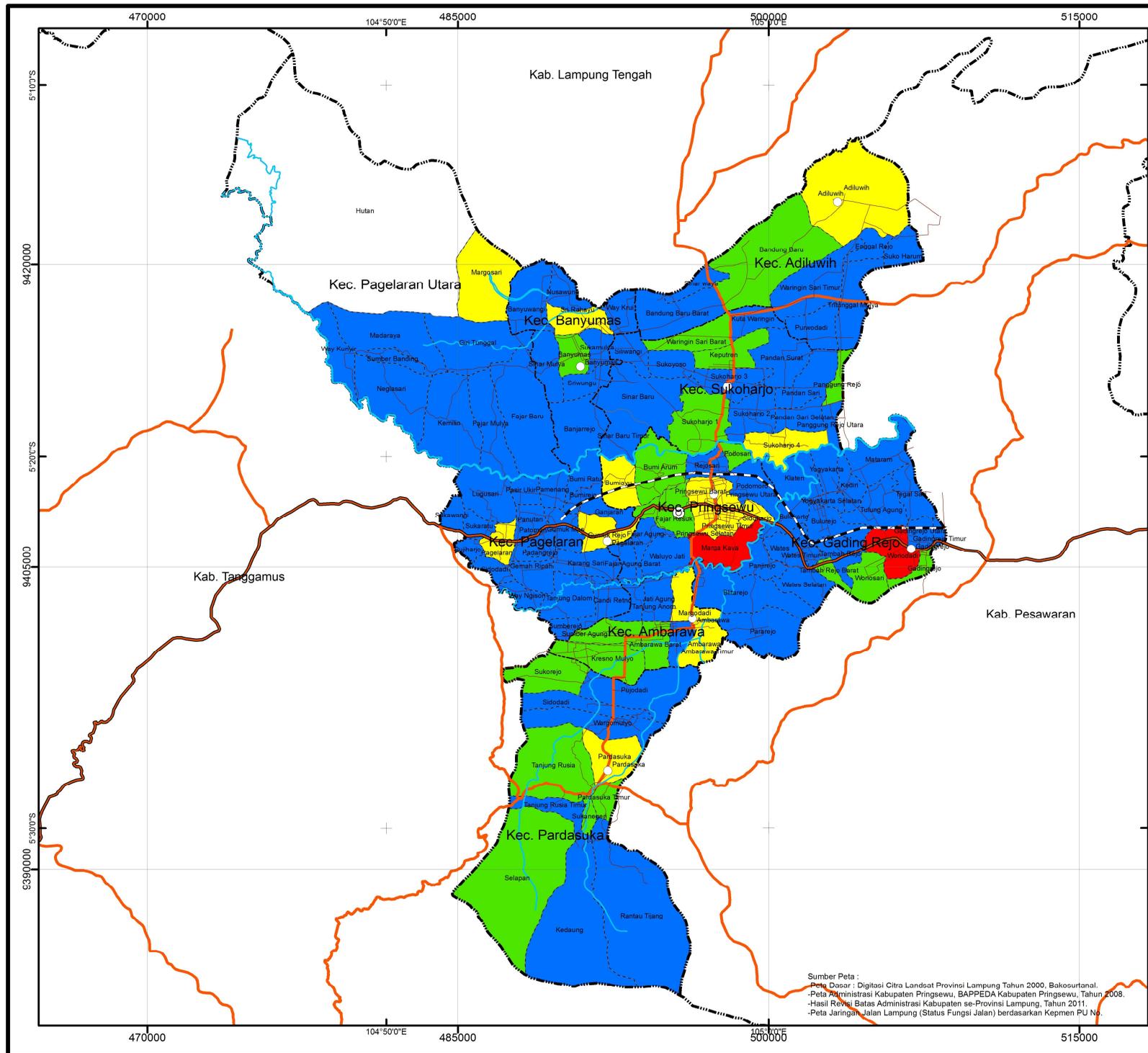
No	Area Berisiko*)	Wilayah prioritas
		Air Limbah
1.	Risiko 4	Kelurahan Pringsewu Utara
2		Kelurahan Pringsewu Selatan
3		Kelurahan Pringsewu Barat
4		Pekon Sumber Agung
5		Kelurahan Pringsewu Timur
6		Kelurahan Fajaresuk
7		Pekon Bumi Ayu
8		Pekon Bumi Arum
9		Pekon Rejosari
10		Pekon Margakaya
11		Pekon Sidoarjo
12		Pekon Tanjung Anom
13		Pekon Sumber Agung
14		Pekon Podosari
15		Pekon Kresnomulyo
16		Pekon Jati Agung
17		Pekon Margodadi
18		Pekon Ambarawa Barat
19		Pekon Podomoro
20		Pekon Fajar Agung
21		Pekon Fajar Agung Barat
22		Pekon Waluyo Jati
23		Pekon Sukoharjo

No	Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis:	Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
	BABS : 13% (12.821KK)
	Akses terhadap jamban yang tidak layak: 29,2 % (28.697KK)
	Jumlah truk tinja tidak memadai (hanya 3 unit) Praktek pengurusan tinja sangat rendah pertahun Kondisi IPLT tidak berfungsi optimal

No	Permasalahan Mendesak
2. Aspek Non Teknis:	Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
	Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah
	Cakupan area layanan masih kecil dan didominasi golongan berpenghasilan rendah.
	Kurangnya infrastruktur jaringan air limbah, khususnya di Kecamatan Ambarawa.
	Masih ada penduduk yang memiliki jamban yang tidak kedap air.
	Masih ada perilaku masyarakat yang BABS.
	Persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak.
	Sebagian masyarakat lebih mudah membuang limbahnya ke saluran/sungai atau karena keterbatasan ekonominya belum mampu menyediakan sarana sanitasi sendiri.
	IPLT belum berjalan secara optimal. Saat ini baru terbangun kolam tempat buangan lumpur tinja, sedangkan fasilitas penunjang lainnya belum ada.

b. Area berisiko dan permasalahan persampahan

Untuk sektor persampahan, dalam hal pengelolaan belum dilakukan secara optimal, baru 3 kecamatan atau daerah perkotaan saja yang ditangani, sedangkan untuk kecamatan lainnya belum ditangani, hal ini dikarenakan pada daerah non perkotaan volume sampah masih sedikit dan cenderung sampah yang ada dibakar, dan kegiatan di Dinas terkait belum berjalan program pengurangan sampah dari sumbernya,

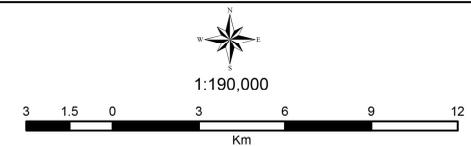


**PEMUTAKHIRAN SSK
KABUPATEN PRINGSEWU**

**PETA AREA BERESIKO SANITASI PERSAMPAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU**

- KETERANGAN :**
- ⊙ Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - ~ Sungai
- FUNGSI JALAN :**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor 1
 - Jalan Kolektor 2
 - Rencana Re Kereta Api
 - Jalan Lingkungan

- SKOR RISIKO SANITASI PERSAMPAHAN**
- Area Kurang Berisiko
 - Area Berisiko Sedang
 - Area Berisiko Tinggi
 - Area Berisiko Sangat Tinggi



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S



**POKJA SANITASI
KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG
2016**

Sumber Peta :
-Peta Dasar : Digitasi Citra Landsat Provinsi Lampung Tahun 2000, Bakosurtanal.
-Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu, BAPPEDA Kabupaten Pringsewu, Tahun 2008.
-Hasil Revisi Batas Administrasi Kabupaten se-Provinsi Lampung, Tahun 2011.
-Peta Jaringan Jalan Lampung (Status Fungsi Jalan) berdasarkan Kepmen PU No.

Tabel 2.14 Area berisiko sanitasi Persampahan

No	Area Berisiko*)	Wilayah prioritas
		Persampahan
1.	Risiko 4	Pekon Margakaya
		Pekon Wonodadi
2.	Risiko 3	Kelurahan Pringsewu Utara
		Kelurahan Pringsewu Selatan
		Kelurahan Pringsewu Barat
		Kelurahan Pringsewu Timur
		Pekon Sidoharjo
		Pekon Bumi Ayu
		Pekon Pagelaran
		Pekon Gumuk Rejo
		Pekon Pargasuka
		Pekon Margodadi
		Pekon Ambarawa
		Pekon Sri Rahayu
		Pekon Adiluwih
		Pekon Sukoharjo – 4
Pekon Margosari		

No	Permasalahan Mendesak
	1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
	Kurangnya sarana operasional persampahan, berupa gerobak sampah dan kendaraan pengangkut sampah yang tidak layak jalan;
	Mengingat dana operasional yang minim, TPA masih menggunakan system open dumping, belum ke sanitary landfill;
	Terdapat beberapa masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan, khususnya disebagian wilayah;

No	Permasalahan Mendesak
2. Aspek Non Teknis:	Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
	Peran swasta dalam memanfaatkan pengelolaan sampah serta melakukan pengelolaan lingkungan masih kurang.
	Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga dari sampah organik, anorganik dan sampah B3, masih kurang;
	Perilaku masyarakat membuang sampah di sungai, drainase lingkungan atau badan air penerima kota masih banyak terlihat;
	Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah;
	Masih adanya pola masyarakat yang membakar sampah, bukan menimbun dan menutup dengan tanah.

C. Area berisiko dan permasalahan drainase perkotaan

Permasalahan drainase di Kabupaten Pringsewu, bisa terlihat pada wilayah-wilayah genangan di sekitar perkotaan. Banjir / genangan yang terjadi merupakan limpasan dari aliran permukaan yang mengalir didalam kota Pringsewu, yang secara topografi relatif datar. Banjir yang terjadi selama ini adalah akibat kesulitan drainase untuk menampung limpasan apabila intensitas hujan cukup tinggi. Kondisi ini terutama terjadi pada gorong-gorong dititik pertemuan antara saluran sekunder.

Sementara berdasarkan data sekunder, persepsi SKPD dan kondisi dilapangan, didapat bahwa area beresiko untuk sektor drainase di Kabupaten Pringsewu berada di daerah perkotaan untuk resiko tinggi, sementara daerah lain masih dikategorikan sedang.

Selengkapnya bisa dilihat pada peta dibawah.



**PEMUTAKHIRAN SSK
KABUPATEN PRINGSEWU**

**PETA AREA BERESIKO SANITASI DRAINASE
KABUPATEN PRINGSEWU**

KETERANGAN :

- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kecamatan
- ▬ Batas Kabupaten
- ▬ Batas Kecamatan
- ▬ Batas Desa
- ~ Sungai

FUNGSI JALAN :

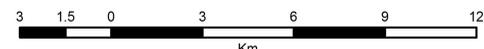
- ▬ Jalan Arteri
- ▬ Jalan Kolektor 1
- ▬ Jalan Kolektor 2
- ▬ Rencana Re Kereta Api
- ▬ Jalan Lingkungan

SKOR RISIKO SANITASI PERSAMPAHAN

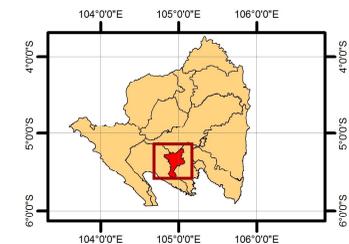
- Area Kurang Beresiko
- Area Beresiko Sedang
- Area Beresiko Tinggi
- Area Beresiko Sangat Tinggi



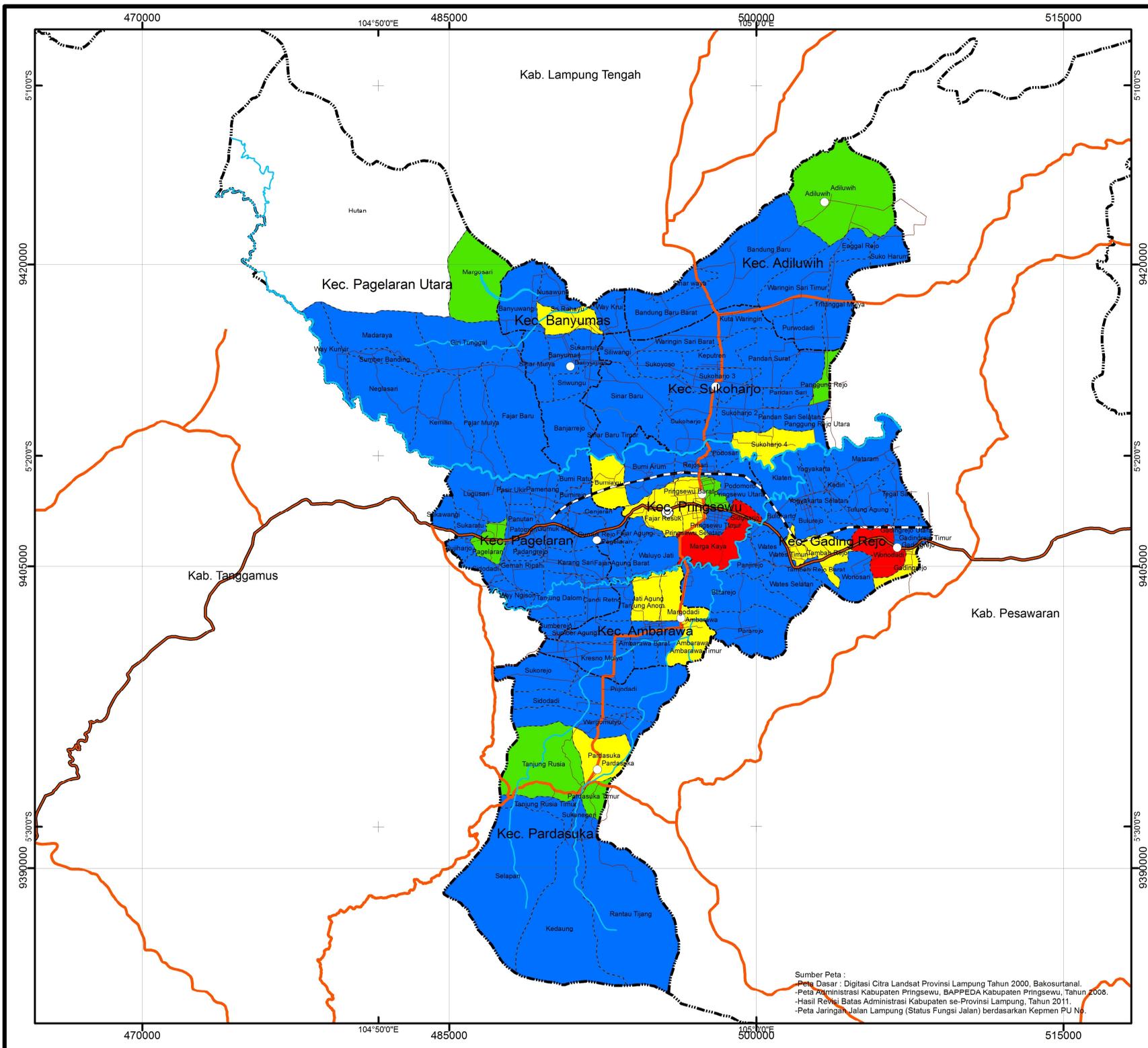
1:190,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator - Datum : WGS 84
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S



**POKJA SANITASI
KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG
2016**



Sumber Peta :
-Peta Dasar : Digitasi Citra Landsat Provinsi Lampung Tahun 2000, Bakosurtanal.
-Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu, BAPPEDA Kabupaten Pringsewu, Tahun 2008.
-Hasil Revisi Batas Administrasi Kabupaten se-Provinsi Lampung, Tahun 2011.
-Peta Jaringan Jalan Lampung (Status Fungsi Jalan) berdasarkan Kepmen PU No.

Tabel 2.15 Area berisiko sanitasi Drainase

No	Area Berisiko*)	Wilayah prioritas
		Drainase
1.	Risiko 4	Pekon Sidoharjo
		Pekon Margakaya
		Pekon Wonodadi
2	Risiko 3	Kelurahan Pringsewu Selatan
		Kelurahan Pringsewu Barat
		Kelurahan Fajaresuk
		Pekon Bumi Ayu
		Pekon Bumi Ayu
		Pekon Tambah Rejo
		Pekon Gading Rejo
		Pekon Wates Timur
		Pekon Pardasuka
		Pekon Jati Agung
		Pekon Margodadi
		Pekon Ambarawa
		Pekon Sri Rahayu
		Pekon Sukoharjo - 4

No	Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis	
	Sering terjadinya genangan pada musim penghujan di beberapa tempat. Ada 7 titik rawan genangan di Kabupaten Pringsewu,.
	Masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jaringan pembuangan limbah home industri tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
	Masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai TPS (tempat pembuangan sampah) yang praktis;
	Masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jamban untuk BAB;
No	Permasalahan Mendesak

2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
	<p>Masyarakat belum ikut menjaga / merawat perangkap pasir yang berada di ujung saluran drainase, sehingga terjadi pendangkalan saluran drainase.</p> <p>Kabupaten Pringsewu yang secara topografi relatif datar, dimana genangan yang terjadi disebabkan dari limpasan aliran permukaan yang mengalir ,</p>

BAB 3

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 Visi dan misi sanitasi

Kabupaten Pringsewu, merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pertumbuhan penduduk rata – rata 1,1%, Kabupaten ini berada pada jalur lintas barat Sumatera yang strategis, telah menjadikan wilayah ini sebagai pusat kegiatan perekonomian wilayah yang sangat ramai, hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu. Pengembangan sanitasi di Kabupaten Pringsewu diarahkan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu sampai pada tahun 2018. Adapun visi misi sanitasi Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.1
Tabel Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Pringsewu

Visi Kabupaten Pringsewu	Misi Kabupaten Pringsewu	Visi Sanitasi Kabupaten Pringsewu	Misi Sanitasi Kab/Kota
" Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu Yang Berkualitas Menuju Masyarakat Yang Sejahtera "	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan, baik Formal maupun Informal; • Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat; • Mengembangkan Infrastruktur dan Suprastruktur untuk Menciptakan suatu Iklim berusaha yang Kondusif; • Meningkatkan Produktifitas masyarakat Kabupaten Pringsewu; • Mengembangkan Sistem Pemanfaatan Ruang yang Seimbang dan Harmonis; • Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Publik yang lebih Transparan, . 	" Mewujudkan Lingkungan Permukiman di Kabupaten Pringsewu yang Bersih, Sehat, Nyaman dan Asri Tahun 2018 "	<p>Misi Air Limbah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat tersedianya septic-tank baik secara individual maupun komunal. <p>Misi Persampahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan lingkungan yang bersih, rapih dan asri. <p>Misi drainase :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan sungai yang bersih, terpadu dengan sistem jaringan drainase yang memadai. <p>Misi PHBS :</p> <p>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pringsewu dengan mendorong perilaku hidup sehat.</p>

3.2 Pentahapan Pengembangan Sanitasi

Pentahapan Pengembangan sanitasi Kabupaten Pringsewu dibagi menjadi tahapan pengembangan sanitasi sektor Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase. Selengkapnya bisa di lihat pada tabel dibawah.

3.2.1 Tahapan Pengembangan Sanitasi

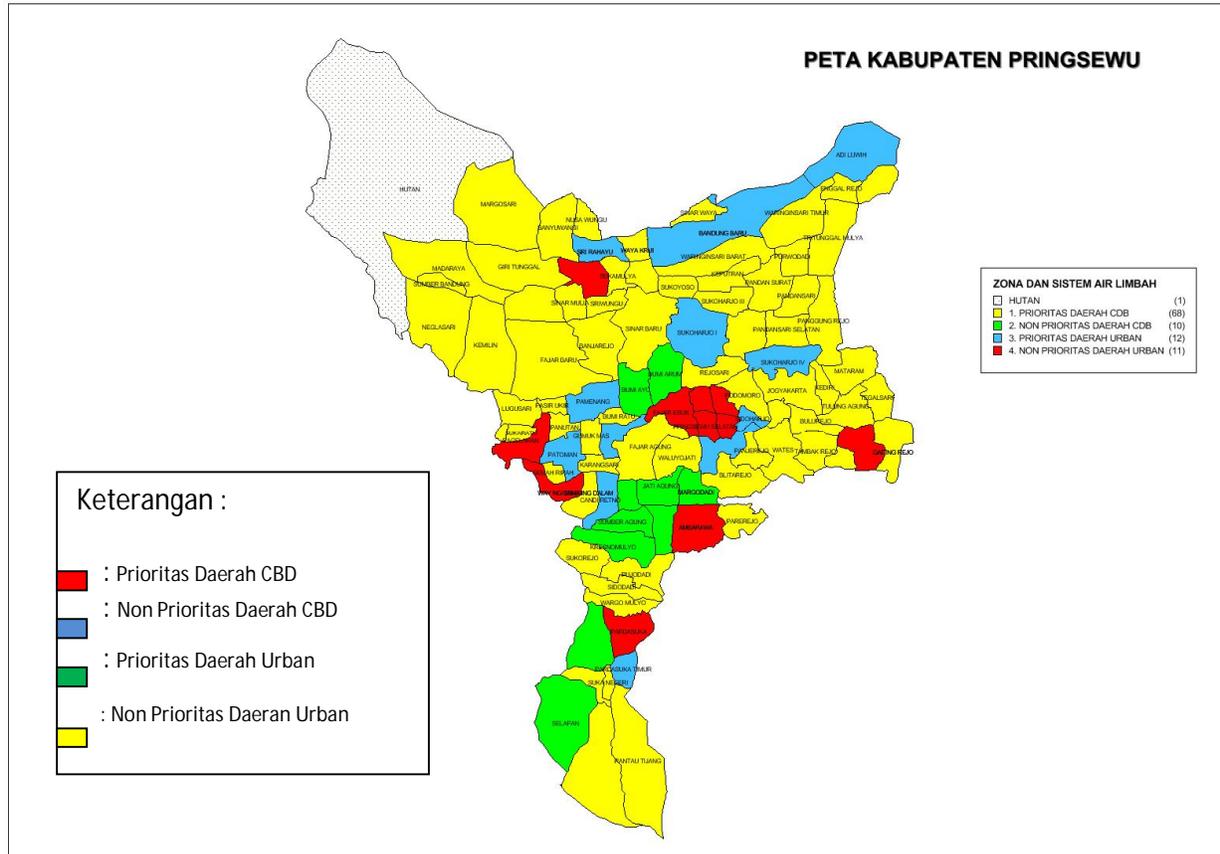
A. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Cakupan layanan sanitasi sektor air limbah eksisting di Kabupaten Pringsewu yang memenuhi syarat dan dinyatakan tidak melaksanakan BABS secara kuantitas adalah sebesar 75%, meliputi tangki septic individual sebesar 56%, cubluk sebesar 29,2%, menggunakan pipa sewer sebesar 1,4 %, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 13% dari jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu masih melakukan aktivitas BABS. Tahapan pengembangan yang direncanakan selama 5 tahun ke depan adalah dengan menuntaskan praktek BABS di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu melalui Peningkatan tangki septic Individual 90% ,MCK+ 5%, Ipal komunal sebesar 5% dan penurunan kepemilikan cubluk sebesar 0%. Sementara itu penuntasan BABS secara kualitas baru akan ditargetkan pada tahapan jangka panjang 15 tahun. Lebih jelasnya tahapan pengembangan air limbah domestic di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.2
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting* (%)	Target cakupan layanan* (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
A	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)**	13	10	0	0
B	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Setempat (Onsite)				
1	Cubluk / Tangki Septik Individual Belum aman ***	29,2	13	0	0
2	Tangki septik Individual	56	73	90	95
3	Tangki septik Komunal (< 10 KK)	0	0	0	0
4	MCK/MCK++	1,8	3	5	2
C	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat (Off-site)				
1	Tangki septik komunal (> 10 KK)	0	0	0	0
2	IPAL Komunal	0	1	5	2
3	IPAL Kawasan	0	0	0	1
4	IPAL Kota	0	0	0	0
	Subtotal	100%	100%	100%	100%

Gambar 3.1
Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik



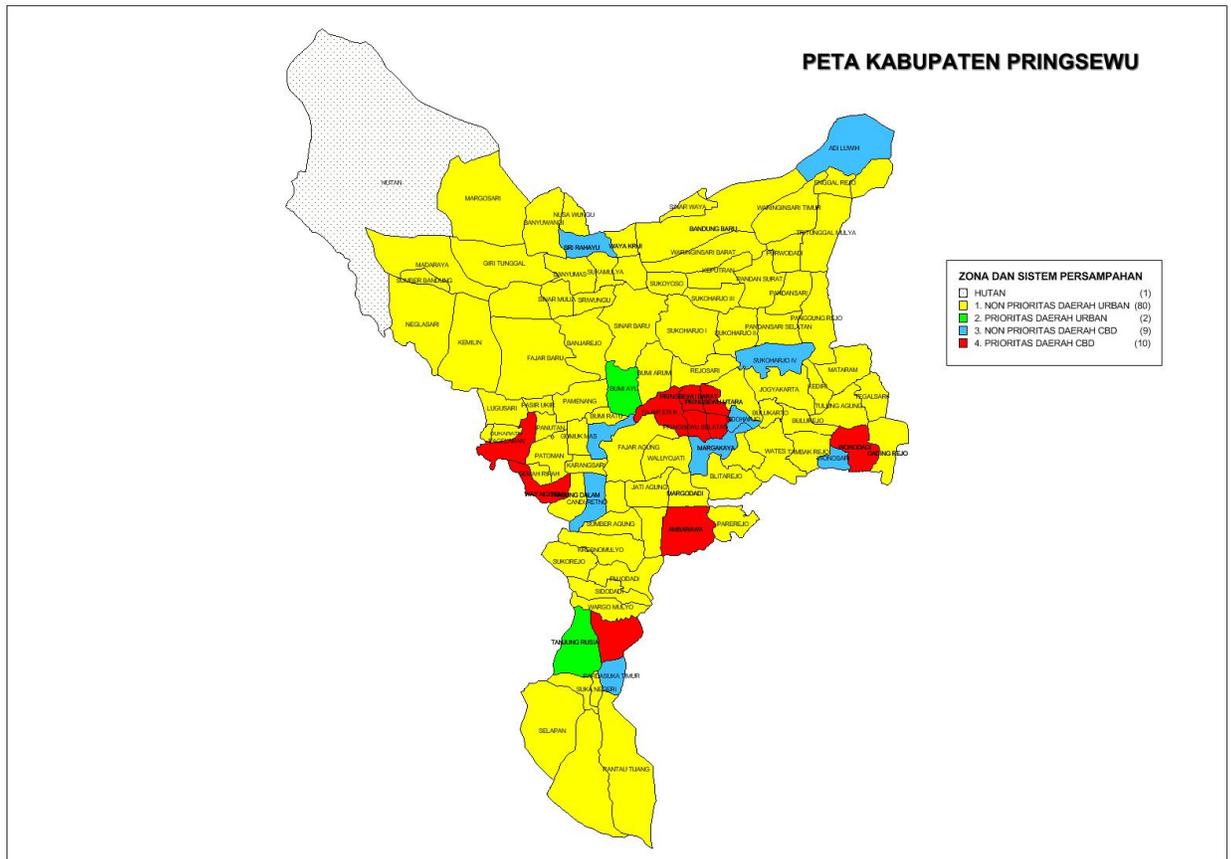
B. Tahapan Pengembangan Persampahan

Layanan persampahan di Kabupaten Pringsewu saat ini masih sangat minim, dari jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh kecamatan sebanyak 958 m³/hari yang tertangani baru sebesar 114 m³/hari (13%). Lebih jelasnya tahapan pengembangan persampahan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Gambar 2.3.

Tabel 3.3
Tahapan Pengembangan Persampahan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting ⁽¹⁾ (%)	Cakupan layanan (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Prosentase sampah yang terangkut Ke TPA	13%	25%	40%	75%
2	Prosentasi sampah tereduksi melalui 3 R	2%	5%	7%	10%
3	Prosentasi sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	70%	60%	50%	15%
4	Prosentasi sampah tidak terolah	15%	10	3	0
	Total	100%	100%	100 %	100%

Peta 3.2
Peta Tahapan Pengembangan Persampahan



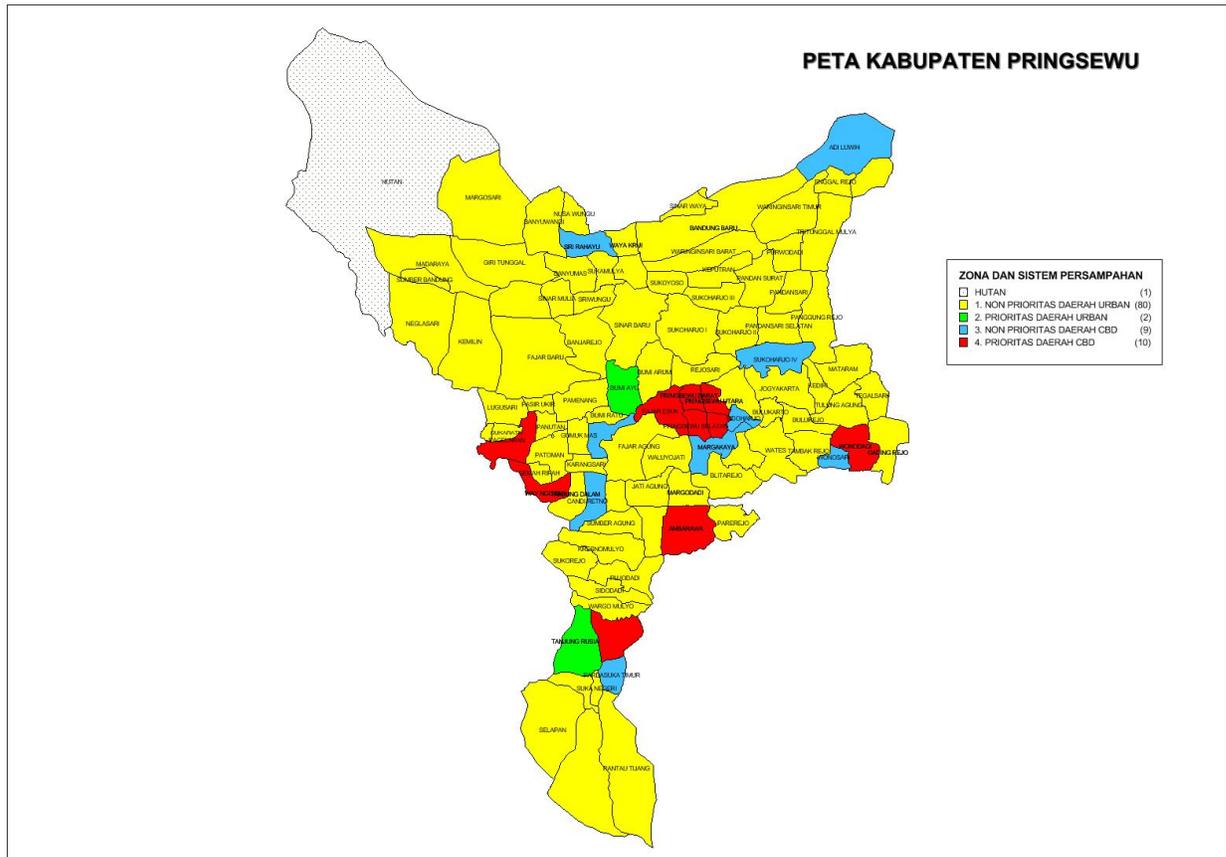
Tahapan Pengembangan Drainase

Sistem pengelolaan drainase di Kabupaten Pringsewu saat ini belum dapat tergambarkan secara pasti dan jelas jangkauan pelayanannya. Hal ini akibat belum dilakukannya pendataan system dan jaringan drainase yang saat ini sudah dibangun di wilayah tersebut yang biasanya selalu berbarengan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan jalan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum untuk saluran drainase di Kabupten Pringsewu, yang sudah ada saat ini baru mengikuti jalan raya yang ada di perkotaan dengan panjang saluran yaitu 8.500 m. Berdasarkan Master plan Drainase (Review) lokasi genangan tersebar di beberapa lokasi banjir, genangan yang terjadi selama ini merupakan limpasan dari aliran permukaan yang mengalir didalam Kabupaten Pringsewu, dimana sungai Way Semah dan Way Sidoarjo difungsikan sebagai saluran Primer yang masih mampu menampung beban drainase. Lokasi genangan yang ada di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Tahapan Pengembangan Drainase

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Tugu Pemuda (Pringsewu Barat)	0,5	0,5	0	0
2	Jl.KH. Ghalib lokasi 1 depan kearah Podomoro	0,5	0,5	0	0
3	Jl.KH. Ghalib lokasi2 depan STIKES	1	-	1	0
4	Jl.KH. Ghalib lokasi 2 depan Gg Dahlia	1	0	0,5	0,5
5	Jl. Kartini lokasi 3 depan Kancab BRI	2	1	1	0
6	Jl. Sudirman sekitar Masjid Takwa	1,5	-	1	0,5
7	Jl. Ke arah terminal /Pasar Sarinongko	0,5	0,5	0	0
8	Jl. Ahmad Yani depan RS mitra Husada	1,5	0	1	0,5
	Total	8,5	2,5	4,5	1,5

Peta 3.3: Peta Tahapan Pengembangan Drainase



3.2.2 Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi

A. Sektor Air Limbah

Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik melalui system On-site tahun 2021 sebesar 90%. Dengan sasaran antara lain meningkatnya jumlah tangkiseptik individual, MCK ++ dan IPAL Komunal sebesar 90% pada tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.6

Tujuan, Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pringsewu

Tujuan	Sasaran	
	Pernyataan sasaran	Data dasar
Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik melalui sistem On-site tahun 2021 sebesar 90%	1. Meminalisir praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	12,2% penduduk melakukan BABS
	Meningkatnya jumlah sambungan rumah ke sistem pengelolaan air limbah sistem On-site sebesar 90% pada tahun 2021. Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik dalam penyedotan tinja pada IPLT	Berkurangnya pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan lingkungan akibat septik tank sebesar 100% pada tahun 2021.
	Meningkatkan jumlah Sambungan rumah pada IPAL Komunal	Bertambahnya jumlah sambungan rumah ke sistem terpusat sebesar 5% pada tahun 2021.

B. Sektor Persampahan

Target yang akan dicapai kabupaten Pringsewu untuk sektor persampahan sebesar 47% pada tahun 2021 cakupan layanan persampahan pada kawasan komersil harus mencapai 15 persen sementara pada kawasan permukiman perkotaan sebesar 32 persen. Sedangkan tujuannya antara lain meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Pringsewu 47 persen pada tahun 2021

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran Pengembangan sektor Persampahan di Kabupaten Pringsewu

Tujuan	Sasaran	
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran
Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Pringsewu sebesar 47% pada tahun 2021	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan pada kawasan komersial sebanyak 15% pada tahun 2021	Terlayannya pengelolaan persampahan pada kawasan komersial sebanyak 27% pada tahun 2020
	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 32% pada tahun 2021	Terlayannya pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 32% 2020.
	bertambahnya jumlah kendaraan pengangkut sampah sebanyak 10 unit	Tersedianya kendaraan pengangkut sampah pada tahun 2020 sebanyak 21 unit
	Menambah Jumlah TPS (Transfer Depo) minimal di seluruh kecamatan di kawasan CBD	Tersedianya lokasi TPS (Transfer Depo) di seluruh kecamatan di kawasan CBD pada tahun 2021
	Menciptakan pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 7% pada tahun 2021	Terbangunnya sistem pengelolaan sampah dengan prinsip 3R pada kawasan permukiman perdesaan sebanyak 7% pada tahun 2021

C. Sektor Drainase

Untuk sektor drainase, Kabupaten Pringsewu tidak termasuk daerah rawan banjir dan bukan daerah banjir rob. Oleh karena itu beberapa kelurahan yang memiliki tingkat resiko tinggi pada sektor drainase. Tahapan pengembangan drainase di Kabupaten Pringsewu mempunyai tujuan, yaitu Tertatanya sistem jaringan drainase perkotaan di Kabupaten Pringsewu sebesar 40% pada tahun 2021 di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan komersial.

Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.8
Tujuan, Sasaran Pengembangan Drainase di Kabupaten Pringsewu

Tujuan	Sasaran	
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran
Tertatanya sistem jaringan drainase perkotaan sebesar 40% pada tahun 2021 di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan komersial.	Memperbaiki sistem jaringan drainase perkotaan sebanyak 40% pada tahun 2021 di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan komersial.	Terpeliharanya drainase lingkungan kawasan komersial di Kab. Pringsewu pada tahun 2021 sebanyak 40%
		Terpeliharanya drainase lingkungan kawasan perkotaan di Kab. Pringsewu pada tahun 2021 sebesar 10%

3.2.3 Skenario pencapaian sasaran

Skenario pencapaian sasaran, Kabupaten Pringsewu sudah mempunyai strategi untuk mencapai sasaran, antara lain bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.9
Skenario pencapaian Sasaran Pengembangan Sanitasi

Sektor Sanitasi	Skenario Pencapaian Sasaran
Sektor Air Limbah	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah berdasarkan dokumen rencana induk (Masterplan) dan peta tahapan pengembangan Air Limbah domestik.- Meningkatkan akses dan cakupan layanan air limbah domestik
Sektor Persampahan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan cakupan pelayanan sampah domestik.- Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana persampahan.- Membangun sistem pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R pada kawasan permukiman perkotaan
Sektor Drainase	Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase perkotaan

3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH

Pendanaan sector sanitasi di Kabupaten Pringsewu baik yang bersumber dari APBD Kota, Provinsi maupun Nasional selama kurun 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan angka yang signifikan. Besaran anggaran sanitasi hanya berkisar antara 0.22% sampai dengan 1,6% dari Belanja Langsung yang ada. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan program sanitasi di Kabupaten Pringsewu selama 5 (lima) tahun ke depan, telah disepakati untuk mengalokasikan anggaran sanitasi minimal sebesar 2% per tahun nya, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN bahkan sumber donor lainnya. Berikut ini dalam Tabel 2.4 diperlihatkan gambaran anggaran sanitasi selama 5 tahun, dan komitmen pendanaan pada masa 5 tahun mendatang.

Tabel 3.10
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pringsewu
untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp x 1000.)					Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	2.002.970	1.932.000	973.000	1.587.784	1.367.000	-0,05
1.1	Air Limbah Domestik	1.248.470	1.232.000	.523,000	274.025	742, 000	0,16
1.2	Sampah Domestik	534.500	300.000	250.000	513.759	634.000	0,16
1.3	Drainase IPerkotaann	220,000	400.000	200.000	800.000	200,000	0,63
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	2.720.000	-	-	4.028.270	1.560.420	0,33
2.1	DAK Sanitasi	1.320.000	-	-	2.252.337	1.560.420	0,26
2.2	DAK Lingkungan Hidup	1.400.000	-	-	1.775.933	725.301	0,4
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	
	Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)	4.722.000	1.932.000	973.000	5.616.054	2.927.420	0,81
	Total Belanja Langsung	288.757.290	360.946,25	433.135,2	519.762,24	550.714.68	
	% APBD murni terhadap Belanja Langsung	1,6	0,5	0,22	1,1	0,47	0,7
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							

Tabel 3.11: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)x 1.000					Total Pendanaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Perkiraan Belanja Langsung	648.457.630	722.457.000	750.457.000	820.902.000	850.902.000	2.121.371
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	2.387.000	3.450.000	4.550.000	5.000.000	5.020.000	20.407.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	1.015.400	2.200.700	2.508.000	2.600.400	2.806.000	11.130.580

Tabel 3.12: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab Pringsewu untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.x 1000)					Pertumbuhan rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Belanja Sanitasi						
1.1	Air Limbah Domestik	1.248.470	1.232.000	.523.000	452.000	274.025	- 0,57
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (<i>justified</i>)	-	-	5.000	8.700	18.700	0,94
1.2	Sampah Domestik	534.500	300.000	250.000	425.000	600.700	0,34
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (<i>justified</i>)	48.110	2.500	11.000	40.163	60.000	1,54
1.3	Drainase Perkotaan	220.000	400.000	200.000	3.285.000	2.200.000	3,84
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan (<i>justified</i>)	0	0	0	0	0	0

Tabel 3.13: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Pringsewu untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2021

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.x 1000)					Total Pendanaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi						
1.1	Air Limbah Domestik	1.000.000.	2.312.000.	3.612.000.	3.237.000	2.512.000	12.673.000
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (<i>justified</i>)	100.800.	200.400	300.000	200.000	150.240	861.440.000
1.2	Sampah Domestik	1.500.000	1.600.000	980.000	583.000	385.000	1.951.100
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (<i>justified</i>)	100.000	250.800	150.000.	100.600	80.000.	681.400
1.3	Drainase Perkotaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000.	665.000	4.415.000
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan (<i>justified</i>)	100.000.	100.000.	100.00	100.000	150.000	550.000

Tabel 3.14 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Pringsewu dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp. X 1000)					Total Pendanaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	150.000	200.000	250.000	265.000	290.000	1.155.000
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	2.387.000	3.450.000	4.550.000	5.000.000	5.020.000	20.407.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	1.015.400	2.200.700.	2.508.000	2.600.400	2.806.000	11.130.580
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	2.237.000	3.250.000	4.300.000	4.735.000	4.730	9.995.000
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	865.400	2.000.000	2.258.000	2.335.400	2.516.000	9.975.500

BAB 4

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya percepatan pembangunan sanitasi melalui target universal akses yaitu 100 Persen pelayanan air minum, 0 persen wilayah kumuh dan 100 persen sanitasi layak.

Tujuan, sasaran dan strategi percepatan pembangunan sanitasi harus sejalan dengan visi misi sanitasi yang ada di Kabupaten Pringsewu. Hal ini penting karena tujuan, sasaran dan strategi yang telah disepakati harus dapat memberikan arah terhadap penetapan pengembangan sanitasi. Tujuan dan sasaran harus sesuai dengan kaidah SMART (*specific, measurable, attainable, realistic* dan *time-bound*), yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan mempunyai jangka waktu yang jelas. Permasalahan sanitasi dan isu strategis yang ada di Kabupaten Pringsewu meliputi :

4.1 AIR LIMBAH DOMESTIK

Berdasarkan kondisi permasalahan air limbah, hasil analisa SWOT , peta tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Pringsewu serta berdasarkan kawasan terbangun *Central Business Districts* (CBD) dan Peta Area beresiko sanitasi yang terdapat dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) yang dipadukan dengan SPM, RPJMN, RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pringsewu, maka tujuan, sasaran dan strategi untuk pencapaian pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
Pengembangan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pringsewu

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik melalui Tangki Septik Individual tahun 2021 sebesar 90%	Meningkatnya jumlah Tangki septik Individual sebesar 90% pada tahun 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Berkurangnya pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan lingkungan akibat septik tank sebesar 90% pada tahun 2021.2.	Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah yang memadai berdasarkan dokumen rencana induk dan peta tahapan pengembangan Air Limbah domestik
	Meningkatkan Pelayanan pengelolaan Air Limbah domestik terpusat melalui revitalisasi IPLT dan Optimalisasi IPAL Komunal pada tahun 2021	Meningkatnya layanan Pengelolaan Air Limbah terpusat melalui IPAL Komunal pada tahun 2021 sesuai tahapan pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatkan akses dan cakupan layanan air limbah domestik
	Meningkatkan jumlah Sambungan rumah pada kawasan yang sudah tersambung ke jaringan terpusat	Bertambahnya jumlah sambungan rumah ke sistem terpusat sebesar 5% pada tahun 2021.	

Sumber : Hasil Analisis Pokja Sanitasi

4.2 PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN

Tujuan pengembangan sanitasi sub sektor persampahan di Kabupaten Pringsewu adalah meluasnya pelayanan pengelolaan persampahan sebanyak 47% pada tahun 2021. Dari tujuan ini

kemudian dirumuskan sasaran dan strategi. Tujuan, sasaran dan strategi ini dirumuskan berdasarkan kondisi permasalahan persampahan, hasil analisa SWOT serta berdasarkan analisa dari tahapan pengembangan pengelolaan persampahan untuk lima tahun mendatang sesuai peta tahapan pengembangan bidang persampahan yang dipadukan dengan SPM, RPJMN, RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pringsewu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
Pengembangan Persampahan di Kabupaten Pringsewu

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Pringsewu sebesar 47% pada tahun 2021	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan pada kawasan komersial sebanyak 30% pada tahun 2021	Terlayannya pengelolaan persampahan pada kawasan komersial sebanyak 30% pada tahun 2021	Meningkatkan cakupan pelayanan sampah domestik (kawasan komersial)
	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 35% pada tahun 2021	Terlayannya pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 35% pada tahun 2021.	Meningkatkan cakupan pelayanan sampah domestik (kawasan permukiman)
	bertambahnya jumlah kendaraan pengangkut sampah sebanyak 8 unit	Tersedianya kendaraan pengangkut sampah pada tahun 2021 sebanyak 10 unit	Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana persampahan
	Menambah jumlah TPS (Transfer Dipo) untuk melayani Kawasan <i>Central Bussines Distric</i>	Tersedianya lokasi TPS pada tahun 2021 sebanyak 5 buah	

	(CBD)		
	Menambah Jumlah TPS (Transfer Depo) minimal di seluruh kecamatan di kawasan Permukiman	Tersedianya lokasi TPS (Transfer Depo) di seluruh kecamatan di kawasan permukiman pada tahun 2021	
	Menciptakan pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 7% pada tahun 2021	Terbangunnya sistem pengelolaan sampah dengan prinsip 3R pada kawasan permukiman perdesaan sebanyak 7% pada tahun 2021	Membangun sistem pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R pada kawasan permukiman perkotaan

Sumber : Hasil Analisis Pokja Sanitasi

4.3 DRAINASE PERKOTAAN

Skala Prioritas pengembangan pelayanan sistem drainase di Kabupaten Pringsewu berada pada kawasan perkotaan dan Pusat Kawasan Komersil atau *Central Bussines Distric (CBD)* sesuai Dokumen RTRW Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031. Kemudian akan berangsur menuju pengembangan pelayanan drainase pada kawasan permukiman perdesaan terutama diprioritaskan terhadap kawasan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal Promosi. Pada Tabel 3.3 dijelaskan tentang tujuan, sasaran dan strategi pencapaian pengembangan drainase di Kabupaten Pringsewu

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian
Pengembangan Drainase di Kabupaten Pringsewu

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Tertatanya sistem jaringan drainase perkotaan di Kabupaten Pringsewu sebesar 50% pada tahun 2021 di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan komersial.	Memperbaiki sistem jaringan drainase perkotaan sebanyak 50% pada tahun 2021 di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan komersial.	<p>Terpeliharanya drainase lingkungan kawasan komersial di Kab. Pringsewu pada tahun 2021 sebanyak 30%</p> <p>Terpeliharanya drainase lingkungan kawasan perkotaan di Kab. Pringsewu sebesar 20%</p>	Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase perkotaan

Sumber : Hasil Analisis Pokja Sanitasi

BAB 5

Program kegiatan dan indikasi Pendanaan sanitasi

5.1 Ringkasan

Program dan kegiatan mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi Kabupaten Pringsewu merupakan hasil dari kebutuhan yang didapat dari instrumen perencanaan dan merupakan jawaban atas analisa swot yang dilakukann oleh pokja. Selain itu rencana kebutuhan investasi ini juga berdasarkan kebutuhan yang ada di dala form Kerangka Kerja Logis (KKL).

Dalam rencana investasi ini, sektor air limbah menempati urutan tertinggi dimana investasi terbesar terdapat dalam pembangunan instalasi pengelolaan Air Limbah terpusat. Dimana Kabupaten Pringsewu merupakan sebuah Kabupaten yang dalam kurun waktu 10 tahun mendatang merupakan Kabupaten yang berkembang. Selain air limbah juga ada rencana investasi pengelolaan persampahan. Dalam rencana investasi pengelolaan sampah, Kabupaten Pringsewu lebih memfokuskan pada pengelolaan sampah dari sumbernya dengan mendorong masyarakat untuk tidak membakar sampah

Sementara untuk sektor drainase, Kabupaten Pringsewu lebih memfokuskan pada pembangunan drainase dengan sistem gravitasi, Banjir yang terjadi akibat kesulitan drainase untuk menampung limpasan apabila intensitas curah hujan cukup tinggi.

Berikut ringkasan rencana investasi, program dan kegiatan Kabupaten Pringsewu untuk periode perencanaan 2017-2021

Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

X

Rp.1Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	284	2.921	2.368	1.377	800	7.750
2	Persampahan	906	4.058	2.691	751	526	8.936
3	Drainase	750	5.875	10.800	3.500	1.900	23.625
Jumlah		1.940	12.854	10.859	5.628	3.226	40.238

Catatan:

Data tabel ini diambil dari lembar kerja (sheet) Rekapitulasi program, kegiatan dan indikasi pendanaan

Tabel 5.2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

X

Rp.1Juta

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kab/Kota	1.402	9.281	8.506	5.368	3.103	28.380
2	APBD Provinsi	400	180	710	100	-	1.390
3	APBN	138	3.395	6.652	160	123	10.468
Jumlah A		1.940	12.854	10.859	5.628	3.226	40.238
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta						
2	Masyarakat						
Jumlah B							
Total (A + B)		1.940	12.854	10.859	5.628	3.226	40.238

Catatan:

Data tabel ini diambil dari rekapitulasi lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan per sumber pendanaan.

5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Kebutuhan biaya pengembangan ini bersumber dari pendanaan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah harus juga berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran minimal 2 persen dari APBD nya. Sementara pemerintah pusat melalui APBN berkewajiban mendanai semua kegiatan berdasarkan readiness criteria yang sudah ditetapkan seperti pembangunan IPAL terpusat, pemerintah daerah wajib menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik didanai dari APBN.

Berikut tabel rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN untuk lima (5) tahun kedepan.

Tabel 5.3 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota

X

Rp.1Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	221	1.351	791	1.292	707	4.371
2	Persampahan	431	2.055	1.906	576	496	5.384
3	Drainase	750	5.875	5.800	3.500	1.900	18.625
Jumlah		1.402	9.281	8.506	5.368	3.103	28.380

Catatan:

Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota.

Tabel 5.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

X

Rp.1Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	
2	Persampahan	400	180	710	100	-	1.390
3	Drainase	-	-	-	-	-	
Jumlah		400	180	710	100	-	1.390

Catatan:

Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBD Provinsi.

Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

X

Rp.1Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	63	1.570	1.577	85	93	3.388
2	Persampahan	75	1.825	75	75	30	2.080
3	Drainase	-	-	5.000	-	-	5.000
Jumlah		138	3.395	6.652	160	123	10.468

Catatan:

Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBN.

5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Selama ini, mitra potensial di Kabupaten Pringsewu belum begitu banyak, sehingga kegiatan yang bisa didanai oleh non pemerintah khususnya dari pihak swasta belum terlihat, tetapi di beberapa kegiatan seperti kegiatan promosi sanitasi sudah dilaksanakan oleh OPD terkait.

Sementara untuk kegiatan partisipasi masyarakat kebnyaykn berupa tenaga kerja seperti gotongroyong pembersihan saluran drainase yang tidak dituangkan didalam tabel.

Tabel 5.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

X

Rp.1Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0

Catatan:

Data tabel ini diambil dari lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan Partisipasi Swasta/CSR

Tabel 5.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

X

Rp.1juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah							

Catatan:

Data tabel ini diambil dari lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan Partisipasi Masyarakat.

5.4 Antisipasi Funding Gap

Tentu saja funding Gap yang ada sangat terlihat. Karena APBD Kabupaten Pringsewu juga sangat kecil untuk mendanai program yang berkaitan dengan sanitasi. Oleh karena itu antisipasi funding gap ini akan dicari sumber pendanaanya. Karena semua kegiatan yang sudah disusun oleh pokja berdasarkan urutan SIDLACOM harus terpenuhi baik melalui pendanaan APBD, APBD Prov, APBN maupun non pemerintah.

Tabel 5.8 Funding Gap

X

Rp.1Juta

No	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	284	2.921	2.368	1.377	800	7.750
2	Persampahan	906	4.058	2.691	751	526	8.936
3	Drainase Perkotaan	750	5.875	10.800	3.500	1.900	23.625
4	Daftar tunggu (Funding Gap)						
5	Kebutuhan Pendanaan Sanitasi						
6	Gap (%)	-	-	-	-	-	-

Catatan:

Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: program, kegiatan dan indikasi biaya yang belum memiliki sumber pendanaan atau daftar tunggu (funding gap).

Baris (5): Data total kebutuhan pendanaan sanitasi diambil dari Tabel Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun.

Baris (6): Prosentase Funding Gap terhadap total kebutuhan pendanaan, baris 6 = (baris 4 x 100 / baris 5)

BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang esensial dan tidak dapat dipisahkan dari Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Pringsewu. Kegiatan Monitoring dilakukan untuk meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan sreta untuk menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Selain itu kegiatan monitoring untuk mengetahui kesesuaian antar rencana yang telah ditetapkan dalam Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan hasil yang dicapai.

Sedangkan Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dalam Strategi Sanitasi Kota dan dijabarkan dalam rencana program lima tahunan, serta dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan.

Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk memeriksa, mengawasi, dan menilai jalannya program mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga ke kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharaannya. Monitoring adalah cara mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, menelaah faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya

1. Monev partisipatif

Proses dimana stakeholder pada semua tingkatan terlibat dalam pemantauan atau evaluasi sebuah proyek, program atau kebijakan, berbagi kendali atas isi, proses dan hasil dari kegiatan M&E tersebut, dan terlibat dalam mengambil tindakan perbaikan.

2. Monev internal
Proses Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait pada semua bagian dan tingkatan.
3. Monev eksternal
Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi/opd yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Monev di instansi lainnya.
4. Monev khusus
Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim khusus atas permintaan sendiri atau pihak lainnya

Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

Prinsip-prinsip monitoring adalah sebagai berikut:

1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus
2. Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi
3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan.
4. Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi
5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
6. Monitoring harus obyektif
7. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.

Sedangkan prinsip-prinsip evaluasi, adalah:

1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi
3. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
4. Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.
5. Prinsip penggunaan kritis
6. Prinsip kegunaan atau manfaat

Rencana Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan secara berulang(*repetitive*) jangka tahunan. Hasil kesepakatan terkait rencana Monev ini akan ditinjau secara rutin pada dokumen SSK tahunan (*Updating SSK Tahunan*). Kesepakatan dari SKPD terkait kesepakatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kegiatan tahunan (perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah fungsi kegiatan Monev tahun mendatang akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi atau dibawah koordinasi langsung oleh Bappeda

Dasar kebutuhan:

A. Monitoring Tahunan

- a. Semua usulan Program dan Kegiatan yang sudah ada komitmen pendanaannya perlu dipastikan masuk dalam pola mekanisme Pengusulan Anggaran Tahunan.
- b. Kabupaten perlu mengupayakan solusi "*funding gap*" untuk program yang belum jelas komitmen penganggarnya (Program Daftar Tunggu).
- c. Meng-unggah pada web *Nawasis.info* untuk semua aktifitas implementasi kegiatan yang sudah dilakukan.

B. Evaluasi Tahunan

- a. Kebutuhan evaluasi antara Rencana & Realisasi implementasi program tahun sebelumnya.
- b. Kebutuhan penjadwalan ulang.
- c. Perubahan lokasi kegiatan.
- d. Adanya komitmen pendanaan baru/tambahan.
- e. Penyiapan Proposal Kegiatan.
- f. Kebutuhan terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan.

Hal spesifik yang perlu dikaji tahunan adalah:

- Apakah target tahunan dapat dicapai, atau tidak, dan bila tidak kenapa.
- Apakah sasaran dan prioritas sudah tepat.

- Evaluasi terkait Jangka Waktu untuk mencapai sasaran tersebut.
- Evaluasi terkait masalah-masalah yang dihadapi.
- Evaluasi terkait modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya.
- Evaluasi terkait orang, organisasi atau badan pelaksananya.
- Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengendalikan program dan kegiatan yang telah disusun dalam rangka mensukseskan program santasi di Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui pengendalian pencapaian target setiap kegiatan dalam sub sektor sanitasi pada setiap tahunnya. Pelaksanaan monitoring dilakukan berdasarkan pencapaian sasaran dan target atas kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dan akan dilakukan oleh SKPD di Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Lebih jelasnya matrik kendali pelaksanaan pencapaian program SSK di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 5.1, dan pada Tabel 5.2 digambarkan Mekanisme Monev dalam rangka Implementasi SSK.

Capaian Strategis

Tujuan: Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik melalui Sistem On-Site tahun 2021 sebesar 90%					
Sasaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah pengelolaan air limbah ke sisten On-site sebesar 90 % pada tahun 2021 2. Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik dalam penyedotan tinja rumah tangga 					
Tahun					
RENCANA			REALISASI		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
129.000 penduduk di area beresiko memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah di tahun 2021					
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Rp.106 juta	Penambahan Tangki septik Individual	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Rp.106 juta	Penambahan Tangki septik Individual
Pembuatan IPAL Komunal(Sanimas)	Rp.1.600 juta	Tersedianya IPAL	Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	Rp.1.600 juta	Tersedianya IPAL
Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.55.juta	Penguatan jejaring	Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.55.juta	Penguatan jejaring



Tabel Capaian Kegiatan

Tahun 2016				
Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Penambahan Tangki septik Individual	Rp.106 juta	Penambahan akses baru
Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	I . Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	Tersedianya IPAL	Rp.1.600 juta	Penambahan akses baru
Lingkungan Sehat Perumahan	ingkungan Sehat Perumahan	Penguatan jejaring	Rp.55.juta	

Tabel Evaluasi

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
129.000 penduduk di area beresiko memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah di tahun 2021					
26.200 KK memiliki Tangki septik Individual di tahun 2021	250 juta	-	250 juta	Tidak dianggarkan	Dilakukan tahun 2017
6.360 KK tersambung ke sistem pengolahan air limbah IPAL Komunal	4 Kegiatan (1.600 juta)	3 Kegiatan (1.200 juta)	1 Kegiatan (400 juta)	Anggaran terbatas	Dilakukan tahun 2017

Tabel Capaian Strategis

<p>Tujuan: Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan sebesar 47% pada tahun 2021</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di daerah komersial sebanyak 15 % pada tahun 2021 2. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di daerah permukiman sebanyak 32% pada tahun 2021 					
Tahun					
RENCANA			REALISASI		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
	Rp.106 juta	Penambahan Tangki septik Individual	1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Rp.106 juta	Penambahan Tangki septik Individual
I4 . Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	Rp.1.600 juta	Tersedianya IPAL	I4 . Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	Rp.1.600 juta	Tersedianya IPAL
2. Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.55.juta	Penguatan jejaring	3. Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.55.juta	Penguatan jejaring

Tabel Capaian Kegiatan

Tahun 2016				
Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Penambahan Tangki septik Individual	Rp.106 juta	Penambahan akses baru
I4 . Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	I4 . Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	Tersedianya IPAL	Rp.1.600 juta	Penambahan akses baru
6. Lingkungan Sehat Perumahan	7. Lingkungan Sehat Perumahan	Penguatan jejaring	Rp.55.juta	

Tabel Evaluasi

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
129.000 penduduk di area beresiko memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah di tahun 2021					
26.200 KK memiliki Tangki septik Individual di tahun 2021	250 juta	-	250 juta	Tidak dianggarkan	Dilakukan tahun 2017
6.360 KK tersambung ke sistem pengolahan air limbah IPAL Komunal	4 Kegiatan (1.600 juta)	3 Kegiatan (1.200 juta)	1 Kegiatan (400 juta)	Anggaran terbatas	Dilakukan tahun 2017

Tabel Capaian Strategis

Tujuan: Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik melalui Sistem On-Site tahun 2021 sebesar 90%					
Sasaran : <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya jumlah pengelolaan air limbah ke sisten On-site sebesar 90 % pada tahun 2021 4. Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik dalam penyedotan tinja rumah tangga 					
Tahun					
RENCANA			REALISASI		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
129.000 penduduk di area beresiko memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah di tahun 2021					
1.Pengadaan Instalasi Sampah	Rp.109 juta	Penambahan Tangki septik Individual	8.	Rp.106 juta	Penambahan Tangki septik Individual
2.Pembanguna Instalasi Pengolahan Sampah)	Rp.100 juta	Tersedianya IPAL	14 . Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	Rp.1.600 juta	Tersedianya IPAL
3.Pembangunan TPS-3 R , 2 Unit	Rp.700 juta	Penguatan jejaring	9. Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.55.juta	Penguatan jejaring
4.DAK BPLH					

Tabel Capaian Kegiatan

Tahun 2016				
Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
10. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Penambahan Tangki septik Individual	Rp.106 juta	Penambahan akses baru
14 . Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	14 . Pembuatan I PAL Komunal (Sanimas)	Tersedianya IPAL	Rp.1.600 juta	Penambahan akses baru
12. Lingkungan Sehat Perumahan	13. Lingkungan Sehat Perumahan	Penguatan jejaring	Rp.55.juta	

Tabel Evaluasi

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
129.000 penduduk di area beresiko memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah di tahun 2021					
26.200 KK memiliki Tangki septik Individual di tahun 2021	250 juta	-	250 juta	Tidak dianggarkan	Dilakukan tahun 2017
6.360 KK tersambung ke sistem pengolahan air limbah IPAL Komunal	4 Kegiatan (1.600 juta)	3 Kegiatan (1.200 juta)	1 Kegiatan (400 juta)	Anggaran terbatas	Dilakukan tahun 2017



Tabel 6.1: Matriks Kerangka Logis

6.1.1 Sub Sektor Air Limbah Domestik

Tujuan: Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik melalui Sistem On-Site tahun 2021 sebesar 90%														
Sasaran	Indikator	Data Dasar		Target	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Nilai	Sumber & Tahun		Rencana	Realisasi								
Meningkatnya jumlah sambungan rumah ke sistem pengelolaan air limbah sistem On-site sebesar 90% pada tahun 2021.	Berkurangnya pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan lingkungan akibat septik tank sebesar 100% pada tahun 2021	57 %	Study EHRA Tahun 2016	33%				15%					18%	90%
Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik dalam penyedotan tinja rumah tangga	Berfungsinya Instalasi Pengelolaan Air Limbah /IPLT dengan maksimal pada tahun 2017 sesuai tahapan pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik	Tidak Ada	Dinas PU-CK	Tidak ada	10%		20%		30%		40%		50%	
Meningkatkan jumlah Sambungan rumah pada kawasan yang	Bertambahnya jumlah sambungan rumah ke	1%	Study EHRA Tahun 2016	10 %		8,5							8,5%	38%



sudah tersambung ke jaringan terpusat	sistem terpusat sebesar 8% pada tahun 2021.													
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.1.2 Sub Sektor Persampahan

Tujuan: Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan sebesar 47% pada tahun 2021														
Sasaran	Indikator	Data Dasar		Target	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Nilai	Sumber & Tahun		Rencana	Realisasi								
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan pada kawasan komersial sebanyak 15% pada tahun 2021	Terlayannya pengelolaan persampahan pada kawasan komersial sebanyak 15% pada tahun 2021			27%									27%	100%
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 32% pada tahun 2021	Terlayannya pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 32% pada tahun 2021.			32%									32%	100%
bertambahnya jumlah kendaraan	Tersedianya kendaraan pengangkut	2 unit	Disbertam tahun		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			100%



Pemutakhiran SSK

pengangkut sampah sebanyak 10 unit	sampah pada tahun 2021 sebanyak 10 unit		2015											
Menambah Jumlah TPS (Transfer Depo) minimal di seluruh kecamatan(Container) di kawasan CBD	Tersedianya lokasi TPS (Transfer Depo) di seluruh kecamatan di kawasan CBD pada tahun 2021	8	Disbert am tahun 2015		3 unit		3 unit							100%
Menciptakan pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 7% pada tahun 2021	Terbangunnya sistem pengelolaan sampah dengan prinsip 3R pada kawasan permukiman perdesaan sebanyak 7% pada tahun 2021	6	Disbert am tahun 2015	2%										

6.1.3 Sub Sektor Drainase

Tujuan: Tertatanya sistem jaringan drainase perkotaan sebesar 40% pada tahun 2021 di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan komersial.														
Sasaran	Indikator	Data Dasar		Targe t	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Nilai	Sumber & Tahun		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		



Memperbaiki sistem jaringan drainase perkotaan sebanyak 40% pada tahun 2021 di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan komersil.	Terpeliharaan ya drainase lingkungan kawasan komersial pada tahun 2021sebanyak 30%	0%	Dinas PU.CK & BM 2015	30%	10%		11%		13%		13%		14%	100%
	Terpeliharaan ya drainase lingkungan kawasan perkotaan pada tahun 2021sebesar 10%			10%	4%		4%		4%		4%		5%	100%

6.1.4 Sub Sektor PHBS

Tujuan: Menurunnya proporsi Rumah Tangga tanpa akses terhadap sanitasi layak sebesar 90% pada tahun 2021														
Sasaran	Indikator	Data Dasar		Target	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Nilai	Sumber & Tahun		Rencana	Realisasi								
Meningkatkan kesadaran masyarakat	Terbangunnya kesadaran masyarakat			40%									40%	100%



Pemutakhiran SSK

dalam pengelolaan limbah domestik sebesar 40% pada tahun 2021	dalam mengelola air limbah domestik secara memadai dan aman serta berkelanjutan sebesar 40% pada tahun 2020													
Mengurangi kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan sebanyak 60% pada tahun 202	Tercapaiannya pengurangan kebiasaan buang sampah sembarangan sebesar 60% pada tahun 2021			60%									60%	100%
Menurunkan kebiasaan masyarakat dalam Membakar sampah dari 80% menjadi 20% pada tahun 2021	Tercapaiannya pengurangan kebiasaan membakar sampah sebesar 60% pada tahun 2021	80%	Study EHRA tahun 2016	10%									10%	100%
Meningkatkan	Tercapainya	60%	Study	80%									80%	100%



kesadaran dalam CTPS di tatanan sekolah dari 60% menjadi 80% pada tahun 2021	kesadaran masyarakat di tatanan sekolah dalam CTPS sebesar 80% pada tahun 20210		EHRA Tahun 2015											
Meningkatkan kesadaran dalam CTPS di tatanan Rumah tangga dari 20% menjadi 50% pada tahun 2021	Tercapainya kesadaran masyarakat di tatanan rumah tangga dalam CTPS sebesar 50% pada tahun 2021	20%	Study EHRA Tahun 2015	50%									50%	100%

Tabel 6.2
Mekanisme Monev Implementasi SSK

Obyek Pemantauan	Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan	
	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/Pemantau		Penerima Laporan	Format
Usulan Program/Kegiatan Sanitasi di Internal SKPD	Sekretaris SKPD	Kabid P2P Dinkes	Staf	Setelah Musrenbang	Kepala Dinas	Format Monev



Pemutakhiran SSK

Program/Kegiatan Sanitasi dalam Dokumen RKPD	Bappeda	Kabid Fisik Bappeda	Staf	Maret-Juni	Bupati	Format Monev
Program /Kegiatan Sanitasi dalam Dokumen Renja SKPD	Kapala SKPD	Kabid CK Dinas PU	Staf	Juli-Agustus	Bappeda	Format Monev
Pelaksanaan Program Kegiatan Sanitasi	Bappeda	Kabid Fisik Bappeda	Staf	Selama implementasi proram kegiatan	Sekda	Format Monev

Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota terdiri dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota berisi tentang pemetaan sanitasi skala kabupaten/kota, kerangka pengembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi dan strategi, serta kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota hingga 5 (lima) tahun kedepan. Pemutakhiran SSK merupakan pemantapan dari perencanaan SSK yang telah lewat masa perencanaannya untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi dan mengakomodasikan pencapaian target universal access.

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota. SSK ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi.

Pentingnya dilakukan pemutakhiran SSK Kabupaten Pringsewu, antara lain :

4. Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK sebelumnya telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun.
5. Untuk peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang masih menyisakan data dan informasi yang belum disajikan atau belum lengkap sehingga ada keraguan atas validitas data yang digunakan.
6. Sejalan dengan target pemerintah yaitu untuk mempercepat implementasi pencapaian target Universal Access di tahun 2019.

Pemutakhiran SSK ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pokja melalui berbagai study dan kajian diantaranya study Environment Health Risk Assessment (EHRA). Study ini dilakukan untuk melihat sejauhmana kondisi lingkungan terhadap resiko kesehatan masyarakat. Hasil study EHRA ini menjadi masukan untuk menentukan area beresiko sanitasi untuk sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan. Study EHRA juga menentukan terhadap pengisian instrumen profil dan instrumen perencanaan sehingga hasil dari Study EHRA ini sangat menentukan terhadap pemutakhiran SSK.

Selain study EHRA, data-data sekunder lainnya seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah juga sangat menentukan untuk pengisian instrumen dan penentuan zonasi atau tahap pengembangan sanitasi selama 20 tahun ke depan.

Berikut profil sanitasi Kabupaten Pringsewu saat ini.

a. Air Limbah Domestik

(1) Sistem dan infrastruktur

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu terbagi atas sistem setempat (onsite dan sistem terspusat (offsite). Kabupaten Pringsewu belum memiliki IPAL Komunal, dan baru dibuat pada tahun 2016 ini yaitu melalui Program Sanimas IDB, lokasi Sanimas pada tahun 2016 ini antara lain :

- ✓ Kelurahan Pringsewu Barat
- ✓ Kelurahan pringsewu Selatan
- ✓ Kelurahan Pringsewu Utara

- ✓ Pekon Pagelaran
- ✓ Pekon Patoman
- ✓ Pekon Pagelaran
- ✓ Pekon Podomoro

Sistem pengelolaan Air Limbah yang ada di Kabupaten Pringsewu selain IPAL Komunal terdapat juga Prasarana Pembangunan MCK++ dari dana DAK Sanitasi.

Prasarana dan Sarana MCK++ yang sudah ada di Kabupaten Pringsewu menyebar pada daerah rawan Sanitasi berdasarkan Peta Area Beresiko yang ada, adapun lokasi yang sudah terbangun MCK++ sebanyak 20 Unit, yaitu :

No	NAMA KEGIATAN	LOKASI	TAHUN
1	Pembangunan MCK++	Pekon Pardasuka Timur	2010
2	Pembangunan MCK++	Pekon Purodadi & Pardasuka	2011
3	Pembangunan MCK++	Pekon Way Ngison, Sukaharjo.III, Waluyojati dan Klaten	2012
4	Pembangunan MCK++	Pekon Jati Agung, Purwodadi, Sinar Waya dan Selapan	2013
5	Pembangunan MCK++	Pekon Purwodadi, Tulung Agung, Sinar Baru Timur dan Mulyo Rejo	2014
6	Pembangunan MCK++	Pekon Margakaya, Adiluwih, Bulukerto, Karang Sari dan Banyuwangi	2015

Jumlah penduduk yang masih BABS di kota yaitu sebanyak 12.821 KK atau sebesar 13 % dari total penduduk Kota yang sudah mencapai 79.464 KK pada tahun 2015.

b.Persampahan

(1)Sistem dan infrastruktur

- Cara pengumpulan sampah, mengumpulkan sampah dari sumber sampah untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) dan atau ke tempat pemrosesan akhir (TPA dimana dalam pelaksanaannya ada yang disebut pelayanan individu dan pelayanan komunal.
Pada pelayanan individu pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan dengan mendatangi tiap rumah, sebagai alat pengumpul dapat berupa gerobak sampah dengan volume 1m3 sering disebut juga pelayanan langsung.
- kendaraan angkut jarak pendek. Sampah yang dikumpulkan dibawa ke tempat penampungan sementara sebelum sampah tersebut dibuang di tempat pemrosesan akhir (TPA). Selain gerobak, kendaraan lain yang dipergunakan untuk mengangkut sampah pada pelayanan individual adalah mobil pick up dan dump truck disebut juga pelayanan door to door dengan kendaraan jarak jauh dimana sampah dikumpulkan dari tempat pewardahan (sumber sampah) ke tempat pemrosesan akhir.
- Pelayanan komunal dimana pengumpulan sampah dilakukan oleh masing-masing penghuni rumah dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan oleh DKP berupa container. Pelayanan seperti ini diperuntukan pada daerah yang belum teratur (Slum Area)

- Kabupaten Pringsewu memiliki 18 tempat penampungan sementara yang tersebar di wilayah. Masing-masing TPS dilengkapi dengan kontainer.
- Pengelolaan sampah baru 13% yang dibawa ke TPA.
- TPA berlokasi di Pekon Bumi Ayu Kecamatan Pringsewu, dengan luas areal ± 3,5 Ha, dengan perencanaan Sanitary Landfeel
- Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah belum optimal.

c. Drainase Perkotaan

Pengelolaan drainase di Kabupaten Pringsewu terdiri dari :

- Penanganan sungai : Kedungpane, Sukalila, Kesunean dan Kalijaga merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung, yang merupakan instansi Kementerian Pekerjaan Umum RI, yang berkedudukan di wilayah Cirebon.
- Pengelolaan drainase di Kabupaten Pringsewu merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.
- Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan belum optimal.
- Masih adanya masyarakat yang kurang bijaksana dalam memaknai fungsi drainase, diantaranya pembuangan sampah di saluran drainase.
- Kondisi serta pemanfaatan saluran drainase yang kurang baik menyebabkan pada musim penghujan sering terjadi genangan di beberapa tempat di Kabupaten Pringsewu

Sementara untuk program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	284	2.921	2.368	1.377	800	7.750
2	Persampahan	906	4.058	2.691	751	526	8.936
3	Drainase	750	5.875	10.800	3.500	1.900	23.625
Jumlah		1.940	12.854	10.859	5.628	3.226	40.238

**Tabel Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran**X Rp. 1
Juta

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kab/Kota	1.402	9.281	8.506	5.368	3.103	28.380
2	APBD Provinsi	400	180	710	100	-	1.390
3	APBN	138	3.395	6.652	160	123	10.468
Jumlah A		1.940	12.854	10.859	5.628	3.226	40.238
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta						
2	Masyarakat						
Jumlah B							
Total (A + B)		1.940	12.854	10.859	5.628	3.226	40.238